



Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013



KATA PENGANTAR



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2013 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2013 ini merupakan laporan kinerja tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 yang berkualitas serta telah menyelesaikan berbagai penugasan lainnya dalam rangka koordinasi dan kerjasama pembangunan, baik secara nasional maupun internasional. Rancangan Dokumen RKP 2014 serta penugasan lainnya tersebut dihasilkan melalui suatu proses koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis/pengkajian kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya dokumen RKP 2014 menjadi arah kebijakan nasional tahun 2014 dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan di Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2010-2014. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tahun 2013 telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta telah mencapai seluruh tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2013.

Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya meningkatkan perannya sebagai pengambil kebijakan/keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa melalui kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang bersifat mendukung kegiatan perencanaan pembangunan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

Jakarta, Maret 2014

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

ARMIDA S. ALISJAHBANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA	3
E. SUMBER PENDANAAN	5
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. PENETAPAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. PENGUKURAN KINERJA	13
B. ANALISA ATAS PENCAPAIAN KINERJA	15
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	55
BAB IV PENUTUP	61



DAFTAR TABEL

TABEL 1.	PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2013	4
TABEL 2.	PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2013	5
TABEL 3.	MISI TAHUN 2010 – 2014 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	7
TABEL 4.	TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2013 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	8
TABEL 5.	STRATEGI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	10
TABEL 6.	PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013	11
TABEL 7.	HASIL PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013	14
TABEL 8.	KESESUAIAN ANTARA MUATAN RANCANGAN RKP 2014 DENGAN TARGET/SASARAN DALAM RPJMN 2010-2014	17
TABEL 9.	PERBANDINGAN JUMLAH KEGIATAN RKP 2012 - RKP 2014 DALAM RPJMN 2010-2014	18
TABEL 10.	KESESUAIAN ANTARA RANCANGAN RENJA K/L 2014 DENGAN TARGET/SASARAN DALAM RKP 2014	20
TABEL 11.	SANDINGAN ANTARA KEGIATAN PRIORITAS RKP 2014 DAN RKA-K/L 2014	22
TABEL 12.	KESESUAIAN ANTARA RANCANGAN RKA-K/L 2014 DENGAN TARGET/ SASARAN DALAM RKP 2014	23
TABEL 13.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DARI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2013	27
TABEL 14.	TINGKAT IMPLEMENTASI TAHAPAN PENYUSUNAN RKP 2014	30
TABEL 15.	PENILAIAN TINGKAT IMPLEMENTASI TAHAPAN PENYUSUNAN RKP 2013 DAN 2014	35



TABEL 16.	KINERJA PEMBINAAN SDM APARATUR PERENCANA PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2012-2013	48
TABEL 17.	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DIKLAT SDM APARATUR PERENCANA PUSAT DAN DAERAH	49
TABEL 18.	DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2013	54
TABEL 19.	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2013	55
TABEL 20.	KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2013	57

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	5
GAMBAR 2	PERBANDINGAN JUMLAH KEGIATAN DALAM RKP 2012- RKP 2014 DALAM RPJMN 2010-2014	19
GAMBAR 3	DIAGRAM PROSENTASE KEGIATAN RENJA K/L 2014 TERHADAP SELURUH JUMLAH KEGIATAN DALAM PRIORITAS NASIONAL (RKP 2014)	21
GAMBAR 4	GRAFIK JUMLAH IKK PADA KEGIATAN PRIORITAS RKP 2014 YANG TERPETAKAN DAN YANG TIDAK TERPETAKAN	25
GAMBAR 5	HASIL PENILAIAN PMPRB	44
GAMBAR 6	OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN	50
GAMBAR 7	REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2013	56



IKHTISAR EKSEKUTIF

V

Laporan
Akuntabilitas
Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2013 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan pada tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2013 ini merupakan laporan kinerja tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014.

Visi Kementerian PPN/Bappenas adalah **“Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai misi yaitu: 1) Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas; 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang; dan 3) Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2013, yaitu:

**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2013
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Kesesuaian RPJMN dan RKP 2014 dengan Renja dan RKA K/L 2014)	% kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2014 dengan RPJMN 2010-2014
			% kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2013 dengan rancangan RKP 2014
			% kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2014 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2014
			% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana
			Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP 2014
2	Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PPN/ Bappenas	Meningkatnya peran Kementerian PPN/ Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	% Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/ Bappenas
3	Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/ Bappenas.	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/ Bappenas	% pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM
			% ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas
			fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah
			Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Standar penilaian <i>good governance</i>

Sesuai dengan indikator kinerja tahun 2013, Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan yang bertanggungjawab melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan nasional, telah menghasilkan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 yang berkualitas. Rancangan Dokumen RKP 2014 tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014. Tema dari RKP 2014 adalah: “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, dengan sejumlah isu strategis, seperti: (1) Pemantapan Perekonomian Domestik yang Berkeadilan; (2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; dan (3) Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik.

Rancangan dokumen RKP 2014 tersebut dihasilkan melalui suatu tahapan atau proses penyusunan RKP 2014 yang dimulai dari Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) termasuk Pra Rakorbangpus, Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Propinsi (Musrenbangprov), Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Nasional (Musrenbangnas), baik Pra Musrenbangnas maupun Pasca Musrenbangnas, serta pertemuan lainnya di tingkat teknis baik secara bilateral

maupun trilateral. Selanjutnya rancangan dokumen RKP 2014 tersebut menjadi arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional jangka pendek.

Kementerian PPN/Bappenas juga telah menyelesaikan berbagai penugasan lainnya, baik yang diberikan Pemerintah/Presiden dalam rangka peningkatan koordinasi dan kerjasama pembangunan nasional melalui suatu rencana aksi nasional maupun kerjasama pembangunan internasional. Sedangkan dalam kaitan peningkatan kapasitas kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai hasil yang memuaskan khususnya di bidang pengelolaan keuangan serta pengembangan kapasitas kelembagaan dari aspek organisasi, manajemen SDM dan tatalaksana, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan serta pelayanan, baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mendukung tujuan reformasi birokrasi nasional.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara umum Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2013, walaupun masih terdapat beberapa target yang belum tercapai secara optimal. Belum optimalnya pencapaian target tersebut disebabkan adanya beberapa faktor masalah dan kendala yang dihadapi di tingkat koordinasi. Namun demikian, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pencapaian tersebut terus mengalami peningkatan kualitas, sehingga diharapkan target dapat tercapai secara optimal sampai berakhirnya Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2010-2014.

Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya meningkatkan perannya sebagai pengambil kebijakan/keputusan, think tank, koordinator, dan administrator, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa melalui kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang bersifat mendukung kegiatan perencanaan pembangunan.

Beberapa upaya untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja Kementerian PPN/Bappenas secara terus menerus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional.
2. Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM Kementerian PPN/Bappenas agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) terhadap perubahan lingkungan strategis nasional maupun internasional, sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan pembangunan nasional.
3. Melakukan perbaikan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan *value "Better Performance"* yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014.

Pada tahun 2013, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, telah melaksanakan tugas utamanya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dalam menghasilkan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional tahun 2014. Rancangan kebijakan tersebut disusun melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan, baik tingkat pusat/daerah maupun sektoral/lintas sektoral. Berdasarkan tugas tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2013.

Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2013 dilakukan berdasarkan masukan dari laporan evaluasi capaian kinerja unit kerja eselon 1 dan 2 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kerjanya, dan selanjutnya menjadi Laporan Kinerja Lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri sebagai anggota Kabinet dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi di bidang perencanaan

pembangunan nasional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Tugas tersebut dijabarkan ke dalam beberapa fungsi, sebagai berikut:

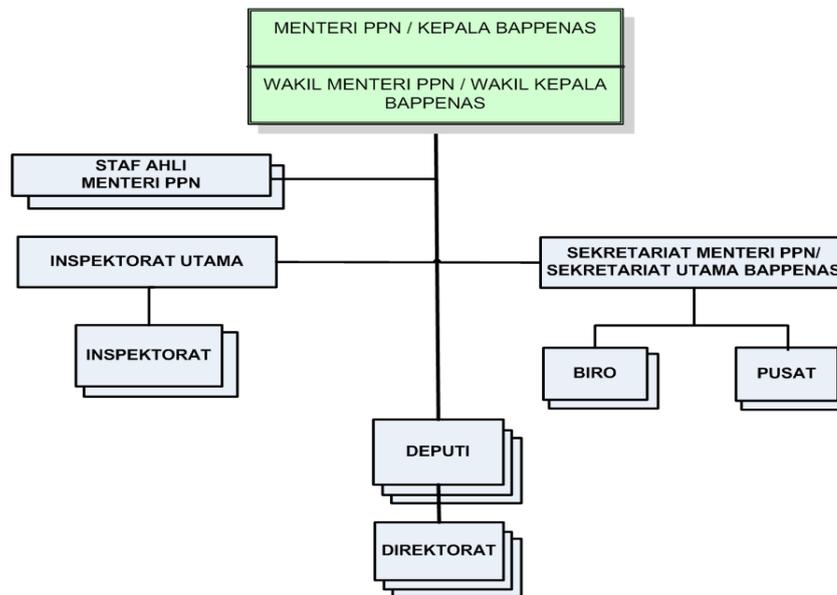
1. Penyusunan rencana pembangunan nasional;
2. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
3. Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
4. Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
5. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
6. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas;
7. Fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
8. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
9. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam rangka koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas, juga melaksanakan antara lain: (1) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Perpres No. 61 Tahun 2011) (2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (Inpres No. 3 Tahun 2010); (3) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Perpres No. 55 Tahun 2012); dan (4) Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara garis besar struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

**BAGAN 1.
STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



Organisasi Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari 17 unit kerja eselon I, 50 unit kerja eselon II, 162 unit kerja eselon III dan 55 unit kerja eselon IV. Sejak tahun 2004, Unit kerja eselon IV di Kedeputan telah diiadakan dan diganti dengan jabatan fungsional perencana (JFP). Unit kerja eselon IV hanya ada di Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Tata Usaha Kedeputan, dan Inspektorat. Pertimbangan penghapusan jabatan eselon IV di Kedeputan adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang perencanaan baik perencanaan makro, sektoral, dan regional. Diharapkan dengan penghapusan jabatan eselon IV dan pengembangan JFP akan mendorong peningkatan kinerja para pegawai di bidang perencanaan pembangunan nasional, khususnya pegawai yang menjabat fungsional perencana.

Unit kerja eselon I meliputi: 1 (satu) unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/ Sekretariat Utama Bappenas, 9 (sembilan) unit kerja Kedeputan, 1 (satu) unit kerja Inspektorat Utama, dan 5 (lima) unit kerja Staf Ahli Kementerian PPN. Unit kerja eselon II meliputi 5 (lima) Biro, 2 (dua) Pusat, 41 Direktorat, dan 2 (dua) Inspektorat. Kemudian, unit kerja eselon III terdiri dari 17 bagian, 138 sub direktorat, serta 7 bidang, dan unit kerja eselon IV terdapat sebanyak 55 unit sub bagian.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

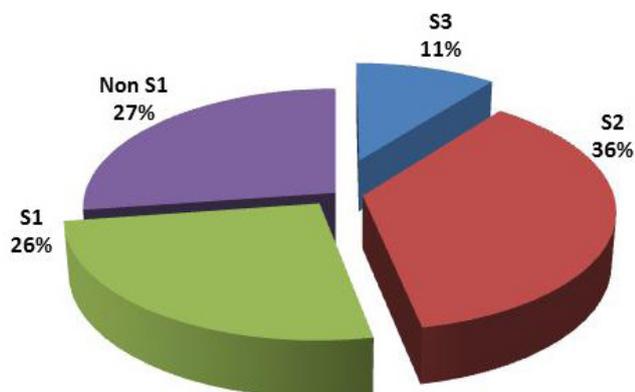
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, jumlah sumber daya manusia yang tersedia adalah sebanyak 832 orang, terdiri atas 764 pegawai organik, 13 pegawai perbantuan, dan 55 pegawai diperbantuan. Dari sejumlah itu, 87 orang (atau 10,45%) diantaranya berpendidikan doktor (S3); 303 orang (36,41%)

master (S2), 215 orang (25,84%) berpendidikan Sarjana (S1), dan 227 orang (27,28%) Sarjana Muda/D3, SLTA, dan SLTP/SD sebagaimana Gambar 1 dan Tabel 1. Dari pegawai tersebut, 238 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural dan sisanya sebanyak 592 orang sebagai fungsional perencana dan staf.

TABEL 1.
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2013

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		S3	S2	S1	Non S1	
1	Pejabat Negara	2				2
2	Eselon I	9	7			16
3	Eselon II	23	27			50
4	Eselon III	17	105	10		132
5	Eselon IV		20	18	2	40
6	Widyaiswara Madya	1	1			2
7	Perencana Utama	3	7			10
8	Perencana Madya	5	25	2		32
9	Perencana Muda	1	37	14		52
10	Perencana Pertama		17	57		74
11	Auditor Madya		2	2		4
12	Auditor Muda		1	1		2
13	Auditor Pertama		2	3		5
14	Auditor Pelaksana Lanjutan				1	1
15	Auditor Pelaksana				1	1
16	Arsiparis Penyelia				3	3
17	Arsiparis Pertama			2		2
18	Staf Perencana	5	29	63		97
19	Tata Usaha			36	107	143
20	Teknisi (Listrik/Telepon)			1	5	6
21	Pramubakti, Caraka, Pengemudi/ Petugas Parkir, Petugas Cafeteria				90	90
22	Satpam				13	13
23	Dpk. Instansi Lain	21	23	6	5	55
JUMLAH TOTAL		87	303	215	227	832

GAMBAR 1.
GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



E. SUMBER PENDANAAN

Pada tahun anggaran 2013, Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.100,720 miliar meliputi anggaran rupiah murni sebesar Rp. 534,502 miliar dan anggaran PHLN sebesar Rp. 566,217 miliar. Anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan Kementerian PPN/Bappenas di bidang perencanaan termasuk evaluasi kinerja pembangunan. Selain itu, dari anggaran tersebut dipakai untuk melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas dalam penguatan fungsi *think tank* (Tabel 2.).

TABEL 2.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2013
(dalam rupiah)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN		
		RM	PHLN	TOTAL
I	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	165.647.497.000	353.202.356.000	518.849.853.000
II	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/ Bappenas	311.005.187.000	213.015.379.000	524.020.566.000
III	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bappenas	53.050.000.000	-	53.050.000.000
IV	Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	4.800.000.000	-	4.800.000.000
JUMLAH		534.502.684.000	566.217.735.000	1.100.720.419.000

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi, misi, serta tujuan organisasi dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014.

“Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”

Untuk mewujudkan visi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan beberapa misi, sebagai berikut :

TABEL 3.
MISI TAHUN 2010 – 2014 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

NO	MISI
1	Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah; b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3	Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2013, sebagai berikut:

TABEL 4.
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2013
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	% Kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2014 dengan RPJMN 2010-2014
			% Kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2013 dengan rancangan RKP 2014
			% Kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2014 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2014
			% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana
			Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2014
2	Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PPN/ Bappenas	Meningkatnya peran Kementerian PPN/ Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	% Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/ Bappenas
3	Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/ Bappenas.	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/ Bappenas	% pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM
			% ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas
			fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah
			Opini dari BPK atas Laporan Keuangan
			Standar penilaian <i>good governance</i>

Selanjutnya Kementerian PPN/Bappenas menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional. Adapun program-program tersebut terdiri dari program utama (teknis) dan program pendukung (generik) sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas yang dimulai dari proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Program ini hanya berjumlah 1 (satu) program, yaitu Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

b. Program Generik

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek organisasi, tatalaksana, sarana dan prasarana, pengawasan dan lainnya. Program ini berjumlah 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program generik 1 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2. Program generik 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program generik 3 : Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Dari berbagai program tersebut telah dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan, baik yang mendukung tugas-tugas utama maupun tugas pendukung dalam melaksanakan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun penjabaran kegiatan tersebut berdasarkan strategi/kebijakan, sebagaimana terdapat dalam Tabel 5 di bawah ini.

TABEL 5.
STRATEGI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, antara pusat dan daerah, serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional 	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggaran, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional
<ol style="list-style-type: none"> Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel Melanjutkan prinsip-prinsip good governance di Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung kinerja lembaga dan pegawai 	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan daerah Penyempurnaan ketatalaksanaan Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah. Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (brand image building) Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan daerah Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas

B. PENETAPAN KINERJA

Pada tahun 2013, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan kembali rencana kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja tahun ke 4 (empat). Penetapan kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2013 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 (Tabel 6).

TABEL 6.
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	% kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2014 dengan RPJMN 2010-2014	100%	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	518.849.853.000
	% kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2014 dengan rancangan RKP 2014	100%		
	% kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) 2014 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2014	100%		
	% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	80%		
	Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2014	cukup baik		
Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas	85%		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	% pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas	524.020.566.000
	% fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah	100%		
	% ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	53.050.000.000
	Opini dari BPK atas laporan Keuangan	WTP	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	4.800.000.000
	Standar penilaian <i>good governance</i>	Baik		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

13

Laporan
Akuntabilitas
Kinerja

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2013 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2013 dengan realisasinya. Pencapaian kinerja tahun 2013 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai untuk tahun 2013, adalah:

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional yang berkualitas.
2. Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas
3. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/ Bappenas.

Dari ketiga tujuan dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas tersebut telah ditetapkan target kinerja sesuai dengan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Adapun hasil pencapaian target indikator kinerja Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2013 terdapat pada Tabel 7 berikut ini.

TABEL 7.
HASIL PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Kesesuaian RPJMN dan RKP 2014 dengan Renja dan RKA K/L 2014)	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2014 dengan RPJMN 2010-2014	100%	100%	100
		2. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) 2014 dengan rancangan RKP 2014	100%	100%	100
		3. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) 2014 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2014	100%	87,00%	87,00
		4. % Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	80%	86,76%	108,45
		5. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP 2014	Cukup Baik	Sangat Baik	>100
2.	Meningkatnya peran Kementerian PPN/ Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/ Bappenas	85%	85%	100
3.	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM	100%	87,11%	87,11
		2. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	100	97,00	97,00
		3. % fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah	100%	98,60%	98,60
		4. Opini dari BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		5. Standar penilaian good governance	Baik	Baik	100

B. ANALISA ATAS PENCAPAIAN KINERJA



Sesuai dengan indikator kinerja tahun 2013, Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan nasional, *telah menghasilkan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 yang berkualitas*. Rancangan Dokumen RKP 2014 tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 pada tanggal 17 Mei 2013.

Rancangan dokumen RKP 2014 memuat Tema: “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, dengan sejumlah isu strategis, seperti:

- 1. Pemantapan Perekonomian Domestik yang Berkeadilan**
 - Peningkatan daya saing
 - Peningkatan ketahanan ekonomi
 - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif
- 2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat**
 - Pembangunan SDM
 - Penurunan kemiskinan
- 3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik**
 - Penyelenggaraan Pemilu 2014
 - Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi
 - Percepatan pembangunan Minimum Essential Force

RKP Tahun 2014 menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Kerja K/L Tahun 2014, acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, dan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2014, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peraturan pemerintah dari turunan Undang-Undang tersebut.

Rancangan dokumen RKP 2014 tersebut dihasilkan melalui suatu tahapan atau proses penyusunan RKP 2014 yang dimulai dari Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) termasuk Pra Rakorbangpus, Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Propinsi (Musrenbangprov), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional (Musrenbangnas) baik Pra Musrenbangnas maupun Pasca Musrenbangnas serta rapat-rapat lainnya di tingkat teknis, baik secara bilateral (antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian/Lembaga-K/L) maupun trilateral (antara Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L dan Kemenkeu). Selanjutnya rancangan dokumen RKP 2014 tersebut menjadi arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional jangka pendek.

Untuk mengetahui hasil pengukuran kualitas Rancangan Dokumen RKP 2014 telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama sebagaimana sasaran strategis dan tujuan pertama. Kelima indikator tersebut diharapkan dapat menjelaskan pencapaian kinerja sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar-waktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga diharapkan peran Kementerian PPN/Bappenas dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian masing-masing indikator kinerja tersebut di atas sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan pertama adalah sebagai berikut :

Tingkat Kesesuaian Antara Muatan Rancangan RKP 2014 dengan Target/Sasaran dalam RPJMN 2010-2014

Tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan.

Kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2014 dengan target/sasaran dalam RPJMN 2010-2014 diukur berdasarkan kegiatan dalam RKP 2014 dibandingkan dengan total kegiatan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai dengan prioritas nasional masing-masing. Adapun persandingan jumlah kegiatan dalam RKP 2014 dengan total kegiatan dalam RPJMN 2010-2014 berdasarkan prioritas masing-masing terdapat pada Tabel 8 berikut.

TABEL 8.
KESESUAIAN ANTARA MUATAN RANCANGAN RKP 2014
DENGAN TARGET/SASARAN DALAM RPJMN 2010-2014

NO	PRIORITAS NASIONAL	JUMLAH KEGIATAN	
		RPJMN 2010-2014	RKP 2014
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	50	44
2	Pendidikan	22	17
3	Kesehatan	16	27
4	Penanggulangan Kemiskinan	37	56
5	Ketahanan Pangan	80	79
6	Infrastruktur	44	37
7	Iklm Investasi dan Iklm Usaha	36	33
8	Energi	23	25
9	Lingkungan Hidup	50	56
10	Daerah Tertinggal Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	45	73
11	Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi	26	18
12	Bidang Perekonomian	32	48
13	Bidang Kesejahteraan Rakyat	23	35
14	Bidang Politik, Hukum dan Hankam	51	55
JUMLAH		535	603

Tabel 8 tersebut di atas menunjukkan bahwa kegiatan yang ada pada RKP 2014 mengalami penambahan kegiatan sehingga melebihi total kegiatan yang ada pada RPJMN 2010-2014. Penambahan ini merupakan respon atas dinamika pembangunan yang berkembang untuk lebih mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka pendek. Seluruh rencana kegiatan yang ada dalam RKP 2014 diharapkan

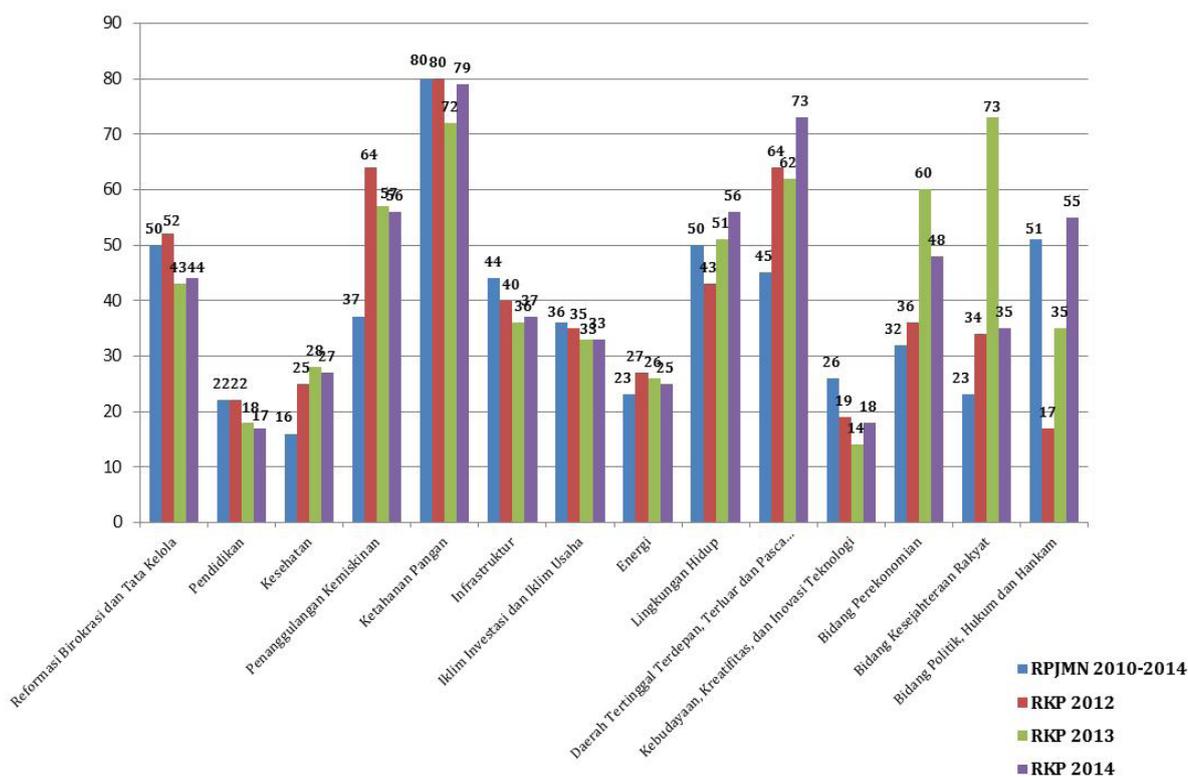
dapat sesuai dengan masing-masing prioritas dalam RPJMN 2010-2014 sehingga dapat mendukung terwujudnya pencapaian target/sasaran pembangunan nasional sebagaimana dimandatkan dalam RPJMN 2010-2014. Dalam melakukan reviu atas kesesuaian muatan rancangan RKP 2014 dengan target/sasaran dalam RPJMN 2010-2014 juga dilakukan *assessment* secara bersamaan atas target/sasaran RPJMN 2010-2014 yang harus dijabarkan dalam sasaran RKP tiap tahunnya. Hal ini untuk membuktikan bahwa antara RPJMN 2010-2014 dengan RKP 2014 telah memiliki integrasi dan sinergis secara konsisten. Dengan demikian, muatan rancangan RKP 2014 harus mendukung pencapaian target/sasaran RPJMN 2010-2014.

Berikut ini terlihat perbandingan kesesuaian antara jumlah kegiatan dalam RKP 2012, RKP 2013, dan RKP 2014 terhadap total kegiatan masing-masing prioritas dalam RPJMN 2010-2014 (Tabel 9 dan Gambar 2). Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada RKP 2012 juga mengalami persbedaan jumlah kegiatan dengan RKP 2013 dan RKP 2014 dibandingkan terhadap total kegiatan masing-masing prioritas dalam RPJMN 2010-2014. Ini artinya bahwa telah terjadi peningkatan kegiatan atas RKP 2012, RKP 2013 dan RKP 2014.

TABEL 9.
PERBANDINGAN JUMLAH KEGIATAN RKP 2012 – RKP 2014
DALAM RPJMN 2010-2014

NO	PRIORITAS NASIONAL	JUMLAH KEGIATAN			
		RPJMN 2010-2014	RKP 2012	RKP 2013	RKP 2014
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	50	52	43	44
2	Pendidikan	22	22	18	17
3	Kesehatan	16	25	28	27
4	Penanggulangan Kemiskinan	37	64	57	56
5	Ketahanan Pangan	80	80	72	79
6	Infrastruktur	44	40	36	37
7	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	36	35	33	33
8	Energi	23	27	26	25
9	Lingkungan Hidup	50	43	51	56
10	Daerah Tertinggal Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	45	64	62	73
11	Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi	26	19	14	18
12	Bidang Perekonomian	32	17	73	48
13	Bidang Kesejahteraan Rakyat	23	36	35	35
14	Bidang Politik, Hukum dan Hankam	51	34	60	55
JUMLAH		535	558	608	603

GAMBAR 2.
PERBANDINGAN JUMLAH KEGIATAN DALAM RKP 2012 - RKP 2014
DALAM RPJMN 2010-2014



Indikator Kinerja

2

Tingkat Kesesuaian Rancangan Renja K/L 2014 dengan Target/Sasaran dalam Rancangan RKP 2014

Tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan.

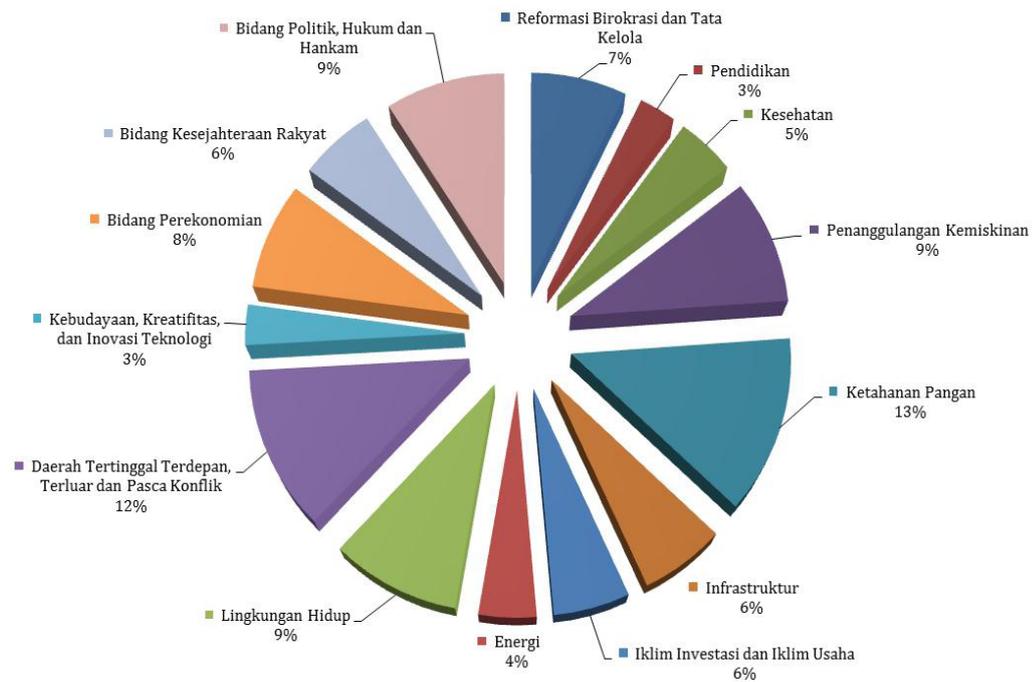
Rancangan Renja K/L 2014 telah disusun berdasarkan pedoman pada RKP 2014. Pengukuran kesesuaian antara rancangan Renja K/L 2014 dengan target/sasaran dalam Rancangan RKP 2014 berdasarkan atas kegiatan prioritas Rancangan Renja K/L 2014 dibandingkan dengan total kegiatan prioritas dalam Rancangan RKP 2014 sesuai dengan prioritas nasional masing-masing. Pemetaan terhadap hasil sandingan jumlah kegiatan prioritas dalam Rancangan Renja K/L 2014 dan total kegiatan prioritas dalam Rancangan RKP 2014 berdasarkan prioritas nasional masing-masing dapat dilihat pada Tabel 10.

TABEL 10.
KESESUAIAN ANTARA RANCANGAN RENJA K/L 2014
DENGAN TARGET/SASARAN DALAM RKP 2014

NO	PRIORITAS NASIONAL	JUMLAH KEGIATAN	
		RKP 2014	RENJA K/L
1.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	44	44
2.	Pendidikan	17	17
3.	Kesehatan	27	27
4.	Penanggulangan Kemiskinan	56	56
5.	Ketahanan Pangan	79	79
6.	Infrastruktur	37	37
7.	Iklm Investasi dan Iklm Usaha	33	33
8.	Energi	25	25
9.	Lingkungan Hidup	56	56
10.	Daerah Tertinggal Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	73	73
11.	Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi	18	18
12.	Bidang Perekonomian	48	48
13.	Bidang Kesejahteraan Rakyat	35	35
14.	Bidang Politik, Hukum dan Hankam	55	55
JUMLAH		603	603

Sebagaimana pada Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa kegiatan prioritas yang ada pada Renja K/L 2014 sudah sesuai dengan total kegiatan prioritas yang ada pada RKP 2014, sehingga diharapkan seluruh pelaksanaan kegiatan Kementerian/Lembaga tahun 2014 dapat mewujudkan pencapaian target/sasaran pembangunan nasional dalam jangka pendek sesuai dengan prioritas masing-masing dalam RKP 2014. Dengan demikian, reuiu dan analisa kesesuaiannya juga dengan mempersandingkan antara sasaran dalam Renja K/L dengan sasaran dalam RKP 2014. Adapun pembagian prosentase antara kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga terhadap total kegiatan dalam Prioritas Nasional dalam RKP 2014 sebagaimana dalam Gambar 3 berikut.

GAMBAR 3.
DIAGRAM PROSENTASE KEGIATAN RENJA K/L 2014
TERHADAP SELURUH JUMLAH KEGIATAN
DALAM PRIORITAS NASIONAL (RKP 2014)



Sesuai dengan Gambar 3 di atas, komposisi kegiatan Renja K/L terhadap kegiatan prioritas RKP 2014 urutan pertama adalah prioritas 5 (Ketahanan Pangan) sebesar 13%; urutan kedua adalah prioritas 10 (Daerah Tertinggal Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik) sebesar 12 %; urutan ketiga adalah prioritas 4 (Penanggulangan Kemiskinan), prioritas 9 (Lingkungan Hidup) dan prioritas 14 (Politik, Hukum dan Hankam) sebesar 9%; urutan keempat adalah prioritas 12 (Perekonomian) sebesar 8%; urutan kelima adalah prioritas 1 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) sebesar 7%; urutan keenam adalah prioritas 6 (Infrastruktur), prioritas 7 (Iklim Investasi dan Iklim Usaha) dan prioritas 13 (Kesejahteraan Rakyat) sebesar 6%; dan urutan terakhir adalah prioritas 2 (Pendidikan), prioritas 8 (Energi), prioritas 11 (Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi) dan prioritas 3 (Kesehatan) sebesar 3-5%. Proporsi dari prosentase kegiatan K/L 2014 dengan kegiatan prioritas RKP 2014 menunjukkan bahwa pembangunan nasional sesuai dengan tema RKP 2014 adalah untuk “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”.

Indikator
Kinerja

3

Tingkat Kesesuaian Rancangan RKA-K/L 2014 dengan Target/Sasaran dalam Rancangan RKP 2014

Tercapai sebesar 87% dari target 100% yang telah ditetapkan.

Rancangan RKA-K/L 2014 merupakan penjabaran dari Rancangan Renja K/L 2014 yang mengacu pada Rancangan RKP 2014. Pengukuran kesesuaian antara muatan rancangan RKA K/L 2014 dengan target/sasaran dalam Rancangan RKP 2014 berdasarkan atas output kegiatan prioritas dalam Rancangan RKA-K/L 2014 dibandingkan dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) prioritas dalam RKP 2014 sesuai dengan prioritas nasional masing-masing.

Berdasarkan pemetaan hasil sandingan kegiatan prioritas dalam Rancangan RKP 2014 (Buku I) dengan RKA-KL 2014, dapat diketahui bahwa jumlah seluruh program dan kegiatan prioritas dalam dokumen RKP 2014 adalah sebanyak 253 Program, dan 603 kegiatan prioritas. Sedangkan jumlah IKK sebanyak 1.795 IKK, dan 5.407 *Output*. Total alokasi untuk kegiatan prioritas dalam RKP 2014 yang ada dalam 14 Prioritas pembangunan nasional tersebut adalah Rp. 370,7 triliun (Alokasi Anggaran), dan total alokasi APBN untuk kegiatan prioritas dalam dokumen RKA-KL 2014 sebesar Rp. 496,0 triliun (Tabel 11). Sedangkan pemetaan kesesuaian antara Rancangan RKA-KL 2014 dengan target/sasaran dalam Rancangan RKP 2014 terdapat pada Tabel 12.

TABEL 11.
SANDINGAN ANTARA KEGIATAN PRIORITAS
RKP 2014 DAN RKA-K/L 2014

GAMBARAN UMUM	RKP 2014	RKA-KL 2014
Jumlah Prioritas	14 Prioritas	14 Prioritas
Jumlah Program Prioritas	253 Program	253 Program
Jumlah Kegiatan Prioritas	603 Kegiatan	603 Kegiatan
Jumlah Indikator (IKK)/ <i>Output</i>	1.795 Indikator	5.407 Output
Total Alokasi (Juta Rupiah)	Rp. 370.739.019 juta	Rp. 496.043.924 juta

TABEL 12.
KESESUAIAN ANTARA RANCANGAN RKA-K/L 2014
DENGAN TARGET/SASARAN DALAM RKP 2014

NO.	PRIORITAS DALAM RKP 2013	JUMLAH PROGRAM		JUMLAH KEGIATAN		JUMLAH INDIKATOR		TERPETAKAN						TIDAK TERPETAKAN					
		2014	2013	2014	2013	2013	2014	2013			2014			2013	2014	2013		2014	
								L	TL	JML.	%	L	TL			JML.	%	TTP	%
1	Reformasi Birokrasi dan Tatakelola	16	43	44	120	127	99	15	114	95,0	67	53	120	94,5	6	5,0	7	5,5	
2	Pendidikan	7	18	17	63	66	47	13	60	95,2	47	12	59	89,4	3	4,8	7	10,6	
3	Kesehatan	9	28	27	73	88	42	16	58	79,5	52	20	72	81,8	15	20,5	16	18,2	
4	Penanggulangan Kemiskinan	28	57	56	137	140	92	13	105	76,6	95	26	121	86,4	32	23,4	19	13,6	
5	Ketahanan Pangan	27	72	79	251	301	178	34	212	84,5	253	37	290	96,3	39	15,5	11	3,7	
6	Infrastruktur	15	36	37	108	94	80	15	95	88,0	60	29	89	94,7	13	12,0	5	5,3	
7	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	15	33	33	93	102	63	11	74	79,6	67	24	91	89,2	19	20,4	11	10,8	
8	Energi	13	26	25	59	61	26	14	40	67,8	35	20	55	90,2	19	32,2	6	9,8	
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	16	51	56	146	171	86	41	127	87,0	109	37	146	85,4	19	13,0	25	14,6	
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	36	62	73	187	212	118	23	141	75,4	152	28	180	84,9	46	24,6	32	15,1	
11	Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi	10	14	18	28	27	18	3	21	75,0	24	1	25	92,6	7	25,0	2	7,4	
12	Perekonomian	17	73	48	170	151	88	44	132	77,6	117	15	132	87,4	38	22,4	19	12,6	
13	Kesejahteraan Rakyat	10	35	35	71	66	46	11	57	80,3	43	12	55	83,3	14	19,7	11	16,7	
14	Politik, Hukum dan Keamanan	31	60	55	145	189	63	29	92	63,4	75	52	127	67,2	53	36,6	62	32,8	
	TOTAL PEMETAAN	250	608	603	1651	1795	1046	282	1328	80,4	1196	366	1562	87,0	323	19,6	233	13,0	

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa output kegiatan prioritas dalam Rancangan RKA K/L 2014 dengan IKK Prioritas dalam Rancangan RKP 2014 belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100%. Realisasi pencapaian target baru mencapai 87,0%, artinya output kegiatan prioritas dalam RKA K/L 2014 dengan IKK Prioritas dalam Rancangan RKP 2014 belum seluruhnya sesuai.

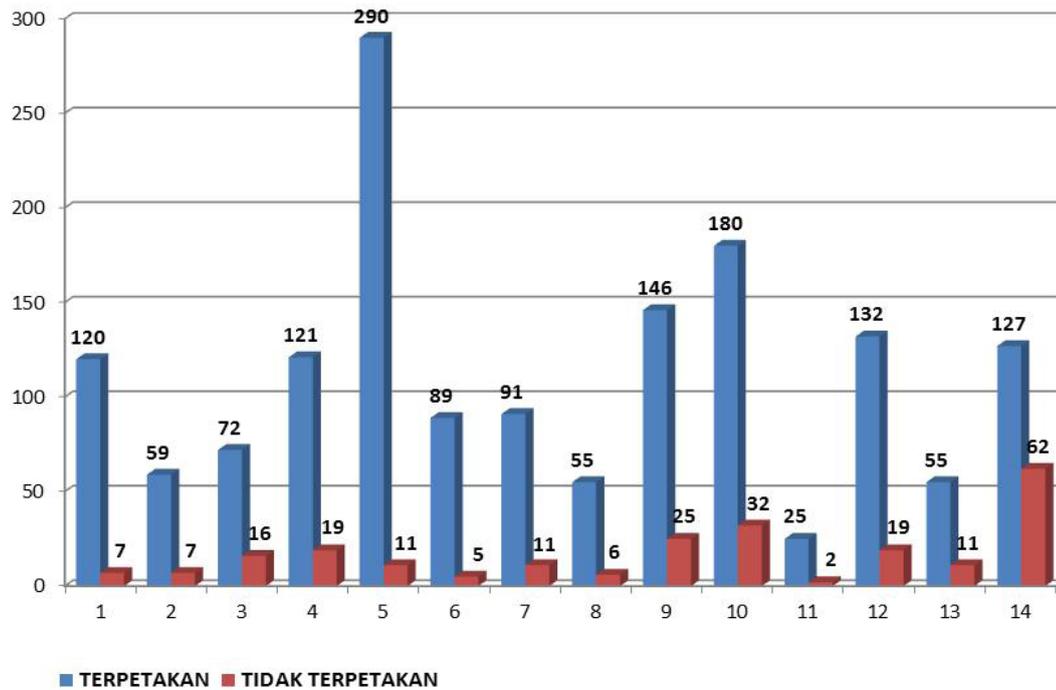
Berdasarkan hasil pemetaan keterkaitan IKK pada seluruh Kegiatan Prioritas dokumen Rancangan RKP 2014 dan *Output* Kegiatan dalam dokumen Rancangan RKA-KL 2014 yang telah dilakukan pada seluruh Prioritas Nasional, didapatkan beberapa catatan yang menunjukkan perubahan dan peningkatan, bila dibandingkan dengan pemetaan keterkaitan RKP dengan RKA-KL tahun sebelumnya. Peningkatan terlihat dengan semakin besarnya persentase IKK yang terpetakan pada kegiatan prioritas dalam RKP 2014 ke dalam dokumen RKA-KL 2014, yaitu menjadi sebesar 87,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 80,5%. Kemudian untuk persentase IKK pada RKP 2014 yang tidak terpetakan menjadi berkurang yaitu menjadi 13,0%, yang sebelumnya sebesar 19,5%.

Namun ketidaksesuaian tersebut dapat dijelaskan dengan hasil pemetaan atau *review* berdasarkan kriteria pemetaan terhadap IKK yang terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- (1) Kriteria terpetakan, yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:
 - Terpetakan Langsung
Terpetakan Langsung, adalah kegiatan prioritas yang IKK-nya terkait langsung atau sama persis dengan output dari kegiatan prioritas yang ada dalam dokumen RKA-KL, baik terkait secara nomenklatur, substansi maupun target/volume kegiatan sebagaimana contoh pada Tabel 13.
 - Terpetakan Tidak Langsung
Kegiatan Prioritas yang IKK Prioritas tidak terkait langsung secara nomenklatur, tetapi secara substansi ataupun target/volume kegiatannya terkait dengan output kegiatan yang ada di dokumen RKA-KL sebagaimana terdapat pada Tabel 14.
- (2) Kriteria tidak terpetakan, yaitu IKK Prioritas yang ada dalam RKP tidak terkait sama sekali/tidak dapat/sulit diterjemahkan dengan output kegiatan yang ada dalam RKA-KL, baik dari segi nomenklatur, substansi maupun target atau volume kegiatannya sebagaimana contoh pada Tabel 15.

Secara grafik jumlah IKK Prioritas dalam Rancangan RKP 2014 yang terpetakan dan tidak terpetakan dapat dilihat pada Gambar 4.

GAMBAR 4.
GRAFIK JUMLAH IKK PADA KEGIATAN PRIORITAS RKP 2014
YANG TERPETAKAN DAN YANG TIDAK TERPETAKAN



Dari Gambar 4 tersebut terlihat bahwa presentase IKK persentase IKK yang terpetakan terbesar juga pada Prioritas 5 (Ketahanan Pangan), kemudian Prioritas 1 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola). Masih terdapatnya IKK yang tidak terpetakan dikarenakan adanya perbedaan pemahaman dalam meletakkan output kegiatan utama dengan kegiatan pendukung. Untuk itu, setiap tahun Kementerian PPN/Bappenas terus mendorong Kementerian/Lembaga dapat menentukan kriteria penentuan output kegiatan utama dengan output kegiatan pendukung sehingga diharapkan untuk tahun berikutnya kegiatan yang tidak terpetakan dapat berkurang. Dengan demikian pencapaian target kesesuaian antara output kegiatan prioritas dalam RKA K/L 2014 dengan IKK Prioritas dalam RKP 2014 semakin meningkat.

Indikator
Kinerja

4

% Sasaran Prioritas Nasional Yang Telah
Sesuai Dengan Rencana

**Tercapai sebesar 86,77% yang melebihi dari
target 80%.**

Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan suatu rencana yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Evaluasi tersebut merupakan salah satu langkah penting dalam manajemen pembangunan. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan akan memberikan informasi atas pencapaian kinerja pembangunan, khususnya pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan yang telah/sedang dilaksanakan dan memuat permasalahan, kendala yang dihadapi, serta opsi tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya.

Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 (*Mid-Term Review*) atas pencapaian terhadap 14 (empat belas) Prioritas Nasional merupakan upaya pencapaian indikator keempat tentang Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Adapun hasil updating dari *mid-term review* hingga Agustus 2013, dari 14 (empat belas) Prioritas Nasional yang dievaluasi, 11 (sebelas) diantaranya diperkirakan akan mencapai target yang diharapkan. Sedangkan 3 (tiga) Prioritas Nasional lainnya masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target sampai dengan tahun 2014. Bila dibandingkan dengan hasil *mid-term review* tahun 2012 terlihat meningkat, yaitu hanya 9 (sembilan) Prioritas Nasional yang diperkirakan mencapai target yang diharapkan.

Dalam melakukan evaluasi tersebut, digunakan 3 warna notifikasi yaitu hijau (sudah tercapai/*on track/ on trend*), kuning (perlu kerja keras), dan merah (sangat sulit tercapai).

Adapun pencapaian kinerja atas indikator sasaran prioritas nasional yang telah sesuai dengan rencana adalah membandingkan antara total sasaran prioritas RPJMN yang tercapai (sesuai warna hijau dan kuning) dengan total sasaran prioritas di RPJMN (warna hijau, kuning dan merah). Dari 14 (empat belas) Prioritas Nasional tersebut, pada tahun 2013 terdapat 136 indikator yang dievaluasi seperti yang terlihat pada Tabel 13.

TABEL 13.
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DARI PRIORITAS NASIONAL
TAHUN 2013

NO	PRIORITAS NASIONAL	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MENURUT KATEGORI CAPAIAN			
		JUMLAH INDIKATOR	SANGAT SULIT DICAPAI	PERLU KERJA KERAS	SUDAH TERCAPAI/ ON TRACK
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	10	4	4	2
2	Pendidikan	6	0	0	6
3	Kesehatan	12	6	3	2
4	Penanggulangan Kemiskinan	5	0	1	4
5	Ketahanan Pangan	9	1	6	1
6	Infrastruktur	14	2	3	9
7	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	9	1	3	5
8	Energi	6	2	1	5
9	LH dan Pengelolaan Bencana	12	0	3	9
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	4	0	4	0
11	Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi	7	0	0	7
12	Politik, Hukum dan Keamanan	12	2	0	10
13	Perekonomian	15	0	6	9
14	Kesejahteraan Rakyat	15	0	1	14
	TOTAL	136	18	35	83
	PRESENTASE	100%	13,23%	25,74%	61,03%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 136 indikator tersebut menunjukkan bahwa 118 indikator telah sesuai dengan rencana (86,77%), yang terdiri dari 83 indikator berwarna hijau (sudah tercapai) dan 35 indikator lainnya mendapat warna kuning (perlu kerja keras). Adapun sebanyak 18 indikator atau 13,23% adalah indikator yang mendapat warna merah, yang dikategorikan belum sesuai dengan rencana dan diprediksi akan sangat sulit tercapai di tahun 2014.

Hasil pengukuran kinerja tersebut di atas disimpulkan bahwa indikator kinerja “% Sasaran Prioritas Nasional yang Telah Sesuai dengan Rencana” tercapai lebih dari target 80% atau 108,45%.



Musrenbangnas 2013

Indikator Kinerja

5

Pendapat Stakeholders Terhadap Proses Penyusunan RKP 2014

Tercapai lebih dari 100% berdasarkan hasil pengukuran kinerja "sangat baik" dari target kinerja "cukup baik".

Pengukuran kinerja pendapat *stakeholders* terhadap proses penyusunan RKP 2014 dilakukan melalui pelaksanaan survei dengan melibatkan *stakeholders* dengan sampel beberapa pemerintah pusat (K/L) maupun pemerintah daerah (Pemda). Tujuan dari pengukuran atas pendapat *stakeholders* terhadap proses RKP 2014 tersebut adalah untuk menilai tingkat kepuasan *stakeholders* atas proses penyusunan RKP 2014 sehingga diharapkan proses RKP tersebut dapat mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mensinergikan antardaerah, antarruang, antar-waktu, dan antarfungsi pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Proses penyusunan rencana merupakan pelaksanaan keseluruhan tahapan perencanaan secara sistematis dan adanya dukungan sumberdaya, melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memilih alternatif tindakan sehingga memudahkan dalam pencapaian tujuan, sasaran/target pembangunan. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu faktor penting yang turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Banyak contoh yang menunjukkan bahwa ketidakberhasilan atau bahkan kegagalan berbagai kebijakan tidak hanya disebabkan oleh faktor kebijakan itu sendiri, namun juga disebabkan oleh perencanaan kebijakan itu sendiri yang tidak dikoordinasikan secara baik sehingga berakibat tidak atau kurang berhasilnya pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan.

Kualitas proses penyusunan rencana secara aktual akan terkait langsung dengan optimalisasi peran Bappenas. Kualitas proses perencanaan akan memberikan gambaran prediktif bagaimana mutu dokumen rencana yang dihasilkan. Keterkaitan ini memberikan alasan logis perlunya mengidentifikasi bagaimana penilaian para pemangku kepentingan terhadap proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Untuk mengukur kualitas proses terhadap penyusunan RKP 2014 diperlukan analisa persepsi *stakeholders* terhadap proses penyusunan RKP 2014, yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Mengidentifikasi dan menguraikan persepsi para pemangku kepentingan terhadap proses penyusunan RKP 2014 khususnya pada aspek jadwal pelaksanaannya (konsistensi implelementasi waktu).

- (1) Mengidentifikasi dan menguraikan tingkat optimalitas atau kualitas pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP 2014.
- (2) Merumuskan saran untuk memperbaiki atau meningkatkan penyelenggaraan penyusunan RKP berdasarkan masukan atau penilaian para pemangku kepentingan perencanaan.

Tahapan dan ruang lingkup atas analisa persepsi *stakeholders* terhadap proses penyusunan RKP 2014 dilaksanakan melalui tahapan :

Penelusuran literatur dan dokumen hasil studi yang relevan.

- *Focus group discussion* (FGD) dengan seluruh tim kajian, narasumber, dan pelaku pembangunan.
- Pengembangan kerangka dan desain kajian.
- Pengembangan instrumen kajian dan evaluasi validitas reliabilitas instrumen yang dikembangkan.
- Pengambilan data primer, melalui metode survey dan FGD.
- Analisis data dan informasi, serta interpretasi hasil analisis.

Hasil yang diharapkan dari analisa persepsi *stakeholders* adalah:

- Teridentifikasinya tingkat konsistensi manajemen waktu implelementasi proses penyusunan RKP 2014.
- Teridentifikasi tingkat optimalitas atau kualitas pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP 2014.
- Memberikan gambaran secara jelas tingkat atau kualifikasi mutu penyusunan RKP dan gagasan pengembangan mutu.

Berikut ini adalah persepsi responden (*stakeholders*) dalam penyusunan RKP 2014 mengenai implementasi jadwal pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan perencanaan, dan penilaian terkait optimalitas dari tahapan setiap kegiatan perencanaan tersebut. Penilaian optimalitas implementasi yang dimaksudkan adalah penilaian khalayak berupa persepsi terhadap kualitas dari pelaksanaan kegiatan dan sejauhmana kondisi tersebut mempengaruhi pencapaian tujuan setiap tahapan kegiatan perencanaan khususnya dalam penyusunan RKP 2014.

Secara keseluruhan tahapan dalam proses penyusunan RKP 2014 dinilai oleh responden rata-rata adalah sangat baik, artinya telah berjalan sesuai harapan seluruh tahapan proses penyusunan RKP 2014. Lebih terinci tingkat optimalitas pelaksanaan masing-masing kegiatan dinilai oleh responden berbeda-beda, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 14 berikut.

TABEL 14.
TINGKAT IMPLEMENTASI TAHAPAN PENYUSUNAN RKP 2014

TAHAPAN KEGIATAN	TINGKAT IMPLEMENTASI KEGIATAN (%)	NOMOR URUT (TERTINGGI–TERENDAH)	NILAI
Pra Rakorbangpus	85,14	4	Sangat Baik
Rakorbangpus	85,71	3	Sangat Baik
Musrenbangprov	87,66	1	Sangat Baik
Pra Musrenbangnas	82,14	5	Baik
Musrenbangnas	87,46	2	Sangat Baik
Pasca Musrenbangnas	85,71	3	Sangat Baik

Berdasarkan analisis pada masing-masing kegiatan tersebut, dapat diketahui bahwa responden menilai implementasi paling optimal dari pelaksanaan kegiatan dalam rangkaian penyusunan RKP adalah pada pelaksanaan Musrenbangprov, selanjutnya adalah kegiatan Musrenbangnas, serta Pra Rakorbangpus. Kegiatan yang dinilai terendah tingkat optimalitasnya oleh responden adalah Kegiatan Pra Musrenbangnas. Berikut ini akan diuraikan secara lebih detail tentang persepsi responden terhadap masing-masing tahapan atau rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan RKP 2014.

(a) Pra Rakorbangpus

Pra Rakorbangpus merupakan kegiatan awal untuk mempersiapkan penyusunan RKP, yang secara substantif punya esensi untuk menetapkan masukan isu strategis sebagai basis pembahasan sinkronisasi pusat daerah. Menurut responden fase kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik, sebagaimana terdapat pada Tabel 19, bahwa responden menilai implementasi kegiatan tersebut mencapai skor 85,14 % dan meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya mencapai skor 54,17%. Hal ini berarti pelaksanaan Pra Rakorbangpus sudah berjalan sebagaimana diharapkan.

Beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan antara lain:

- Forum konsultasi publik yang sudah dilaksanakan tetap dipertahankan, dan perlu diperkuat dengan beberapa saluran yang mampu memediasi komunikasi yang lebih realtime melalui teknologi informasi (internet) ataupun melalui kajian terhadap kebutuhan publik. Selain itu forum konsultasi publik masih harus difokuskan, dengan kecukupan data dan informasi relevan yang memadai. Perlu dipertimbangkan juga untuk

- mengkaji tentang keterwakilan publik dalam konsultasi publik, dan pemahaman terhadap isu strategis yang perlu disepakati dari awal dan diketahui oleh publik. Hal ini untuk meminimalkan pemborosan alokasi waktu karena rendahnya keterwakilan publik dan ketidakpahaman publik tentang pokok bahasan perencanaan.
- Perlunya daerah memperoleh porsi yang lebih besar dalam keikutsertaan atau keterlibatannya dalam proses tersebut. Selain mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan aplikasi UKPPD, maka perlu ruang untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap rancangan isu strategis untuk provinsinya masing-masing khususnya pada forum temu konsultasi Triwulanan I Kementerian PPN/Bappenas-Bappeda Provinsi. Dalam hal ini tema yang disampaikan juga sebaiknya terkait dengan isu daerah secara umum. Selain itu perlu penajaman dan rencana untuk tindak lanjut yang jelas.
 - Perlu dipertimbangkan bahwa dalam pertemuan triwulanan tersebut ditindaklanjuti dengan asistensi di daerah khusus untuk penentuan isu strategis. Ada beberapa agenda daerah yang kurang terakomodir disebabkan oleh kemampuan daerah dalam mengakomodir identifikasi permasalahan di daerah dan mensinkronkannya dengan isu nasional. Kegiatan asistensi tersebut juga untuk meningkatkan kemampuan dan penekanan pentingnya sinergisme pusat-daerah, antar daerah dan memformulasikan tindaklanjut yang ideal berdasarkan penilaian yang logis.

(b) Rakorbangpus

Secara umum Rakorbangpus adalah wahana untuk mendesiminasikan rancangan awal RKP 2014 dan SEB pagu indikatif 2014. Menurut responden kegiatan atau implementasi Rakorbangpus dinilai sangat baik dengan tingkat penilaian sebesar 85,71%. Peran Bappeda Provinsi dalam Rakorbangpus adalah menghadiri Rakorbangpus sebagai peninjau, dan menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap rancangan final isu strategis untuk provinsinya masing-masing pada forum temu konsultasi triwulanan II Kementerian PPN/Bappenas-Bappeda Provinsi.

Sebagian responden memberikan masukan agar Rakorbangpus dapat lebih dioptimalkan, antara lain terkait beberapa hal sebagai berikut:

- Alokasi waktu yang diperlukan untuk daerah perlu ditambah dan memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk menelaah berdasarkan dokumen yang dimiliki.
- Apresiasi dan akomodasi masukan peserta pada tahap kegiatan ini dan kejelasan terhadap tindaklanjutnya.

(c) Musrenbangprov

Pada prinsipnya media Musrenbangprov adalah menghasilkan UKPPD. Secara spesifik keluaran dari kegiatan ini adalah adanya program/kegiatan prioritas yang akan didanai APBD; program/kegiatan yang akan diusulkan untuk didanai APBN melalui; (a) UKPPD lengkap (F3) yang akan menjadi masukan bagi penyempurnaan Renja K/L, (b) kegiatan UKPPD terpilih yang akan menjadi prioritas pembahasan format F1 UKPPD untuk dibahas dalam Pra Musrenbangnas; rancangan RKPd provinsi dan rancangan renja SKPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Musrenbangprov; dan kesepakatan usulan kegiatan dan kerangka isu strategis (maksimal 5 kegiatan).

Secara umum kegiatan Musrenbangprov sudah sangat baik, dan implementasinya menurut responden mencapai 87,66%, yang meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 86,72%.

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan mutunya antara lain dijabarkan berikut. Dalam Musrenbangprov juga dibahas program/kegiatan yang akan diusulkan ke K/L untuk diakomodir dalam DAK. Namun dirasa kurang optimal karena informasi Pagu DAK tidak tersedia atau cenderung sulit untuk diakses. Batasan penganggaran dari komponen DAK juga masih belum dapat dipahami. Informasi mengenai rencana alokasi DAK juga belum dapat diperoleh pada tahap perencanaan ini. Perlu dipertimbangkan untuk adanya regulasi yang relevan bahwa DAK sebagai bagian dari mekanisme musrenbang.

Selain itu pada peran LO diperlukan tidak hanya saat Musrenbangprov, akan tetapi lebih jauh sebagai perpanjangan tangan pusat ke daerah. Namun kemampuan LO perlu ditingkatkan dan juga diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai terkait usulan dan sinergi pembahasan usulan kegiatan APBN, dan penyampaian short list lebih awal. Selain itu LO diharapkan mampu memberikan informasi terkait PraMusrenbangnas dan Pasca Musrenbangnas. Keterbatasan waktu yang ada seringkali menyebabkan hasil Musrenbangprov belum dapat dibawa ke Jakarta oleh LO.

(d) Pra Musrenbangnas

Pra Musrenbangnas adalah forum yang membahas sinkronisasi pusat daerah dan perwilayahan/hari. Secara keseluruhan keluaran Pra Musrenbangnas adalah hasil kesepakatan lokasi, target, dan anggaran antara pemerintah propinsi dan K/L yang disaksikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan disepakati dalam bentuk berita acara kesepakatan; pada forum konsultasi publik, keluaran yang dihasilkan berupa isu-isu strategis hasil forum konsultasi publik yang telah dilakukan; dan untuk Propinsi Papua dan Papua Barat, keluaran yang dihasilkan berupa kesepakatan akhir terhadap lokasi, target, dan anggaran antara Pemerintah Propinsi Papua dan Papua Barat dan K/L dalam rancangan RKT-P4B tahun 2014 yang disaksikan oleh Kementerian

PPN/Bappenas dan dituangkan dalam bentuk acara kesepakatan. Secara umum hasil survei terhadap pelaksanaan Pra Musrenbangnas 2013 sudah berjalan dengan baik, yaitu mencapai 82,14 %.

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan penilaian tindak lanjut dari hasil pleno. Hasil pleno dapat secara optimal ditindalanjuti dalam bentuk Rekapitulasi Berita Acara Kesepakatan yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden di Musrenbangnas. Diharapkan bahwa rekapitulasi berita acara kesepakatan perlu juga diserahkan ke Bappeda provinsi. Secara umum diseminasi informasi yang kurang berjalan optimal berjalan, kurang menguntungkan bagi Pemerintah Daerah. Selain itu sebagai media atau wahana tahapan perencanaan maka Pra Musrenbangnas perlu penyempurnaan pada beberapa hal: (i) perlu pengendalian dan pengawasan Bappenas terhadap usulan yang telah disepakati dengan K/L terutama usulan-usulan baru dari daerah, (ii) jumlah peserta yang dapat mengikuti kegiatan secara proporsional dapat ditambah.

(e) Musrenbangnas

Musrenbangnas adalah tindaklanjut dari Pra Musrenbangnas yang pada hakekatnya berupa kegiatan penyampaian laporan hasil pramusrenbangnas, arahan presiden dan dialog Pusat daerah. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Musrenbangnas adalah laporan kesepakatan mengenai program, kegiatan strategis dan pendanaan pusat dan daerah kepada Presiden RI; Arahan Presiden dan Wakil Presiden RI, dan Paparan 3 (tiga) Menteri Koordinator. Implementasi kegiatan Musrenbangnas menurut responden adalah 87,46%. Beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terkait dengan paparan para Menteri Koordinator dan dialog antar Menteri dan Gubernur. Paparan para Menteri Koordinator mengenai strategi pelaksanaan pembangunan menurut bidang kerja masing-masing sektor dapat dilaksanakan sesuai agenda yang telah direncanakan yaitu Minggu IV April.

Pelaksanaan kegiatan dinilai kurang efektif khususnya pada aspek atau kondisi suasana komunikasi yang terbangun. Pada tahapan kegiatan ini proses komunikasi banyak mengalami gangguan, sebagai dampak dari banyaknya peserta yang hadir dalam satu ruangan. Perlu dipikirkan untuk fasilitasi ruangan dan pola komunikasi yang lebih efektif. Selain itu paparan para menteri koordinator mengenai strategi pelaksanaan pembangunan menurut bidang kerja masing-masing sektor, sudah bermanfaat bagi perencanaan yang disusun untuk tahun-tahun berikutnya. Bila dicermati paparan masing-masing menko hanya bersifat review, kurang memberikan manfaat pada sisi atau konteks koridor yang harus dilaksanakan. Permasalahan ini mungkin dapat berakibat pada ketidakjelasan bagi daerah, atas penjelasan atau reasoning akomodasi terhadap usulan daerah, kenapa disetujui atau

tidak disetujui. Perlu dipertimbangkan untuk membedakan antara strategi pelaksanaan dari menteri dengan rencana dari K/L.

Pada pelaksanaan dialog para Menteri dan Gubernur terkait arahan pelaksanaan dari Presiden berjalan kurang efektif, hal ini disebabkan dialog dilaksanakan hanya oleh sebagian Menteri sedangkan beberapa Menteri mewakili pada staf terkait. Perlu dipertimbangkan agar seluruh Menteri hadir, untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang dan permasalahan yang disampaikan oleh Gubernur. Diharapkan Menteri juga dapat berdialog dan memaparkan terkait bidangnya dan secara kontekstual ada dialog yang sinergis dengan daerah dengan waktu yang memadai.

(f) Pasca Musrenbangnas

Pasca Musrenbangnas adalah pertemuan Bappenas-K/L untuk membahas hasil Musrenbangnas untuk penyempurnaan RKP 2014. Keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan ini adalah rancangan akhir RKP 2014 dan rancangan akhir Renja K/L 2014. Secara umum kegiatan Pasca Musrenbangnas sudah baik, dan implementasinya menurut responden mencapai 85,71%.

Terdapat beberapa usulan dari daerah yang perlu dipertimbangkan terkait dengan tahapan pasca musrenbangnas adalah:

- Perlu terdapat dokumen/laporan hasil pelaksanaan rangkaian Musrenbangnas (pra, musrenbangnas, dan pasca musrenbangnas) yang berisi kesepakatan persandingan prioritas dan sasaran nasional dengan prioritas dan sasaran daerah dalam satu dokumen resmi, sehingga secara konsisten diwujudkan oleh K/L maupun daerah dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemda. Selain itu kesepakatan ini akan menjadi bahan evaluasi daerah dengan K/L dalam pembahasan program/kegiatan bersama K/L masing-masing. Dengan demikian maka hasil Pasca Musrenbangnas perlu disampaikan pada propinsi.
- Persandingan juga diharapkan dapat menjadi acuan daerah dalam menyeleraskan rencana daerah dan pusat. Namun proses ini dikhawatirkan akan menyebabkan tenggang waktu penetapan dokumen perencanaan yang berlarut-larut. Adanya kesepakatan dapat digunakan sebagai alat ukur konsistensi dan menilai keseriusan pihak yang bersepakat dan beritikad baik untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat.
- Pasca Musrenbangnas seharusnya ada trilateral meeting memperjelas dan mengkonfirmasi hal-hal secara substansial ataupun teknis dalam kegiatan yang telah direncanakan, dan memastikan komitmen tersebut dapat dijalankan.

Uraian diatas adalah beberapa pertimbangan oleh Pemerintah Daerah yang dinilai sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki masing-masing tahapan-tahapan pada rangkaian kegiatan dalam penyusunan RKP. Secara umum usulan yang disampaikan

pada proses Musrenbangnas, perlu memberikan perhatian yang diberikan pemerintah kepada daerah harus lebih besar. Efektifitas dan koordinasi di tingkat daerah sampai di tingkat nasional khususnya dalam perencanaan sudah cukup baik. Namun koordinasi antar kementerian perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini selain Bappenas terdapat kementerian teknis yang langsung ke daerah/dinas provinsi.

Dalam pelaksanaannya koridor penyampaian usulan kegiatan oleh daerah kepada pusat adalah sesuai dengan prioritas nasional, melalui forum rapat koordinasi, konsultasi/koordinasi dan penyampaian usulan secara langsung ke K/L, forum pertemuan triwulanan, rakorbangpus, pramusrenbangnas, dan musrenbangnas. Daerah umumnya melakukan screening terhadap usulan kegiatan yang diusulkan kepada pusat, adalah dengan melakukan perujukan prioritas program propinsi yang mengacu pada prioritas pusat. Disamping itu juga melalui rapat koordinasi, rapat kerja, koordinasi dan konsultasi, penetapan skala prioritas, monev, forum SKPD dan mensinkronkannya dengan prioritas nasional dan terus menjalin komunikasi yang efektif dengan pusat. Terdapat harapan bahwa peran LO dapat dimaksimalkan dalam memfasilitasi daerah. Harapan tersebut terkait dengan semakin meningkatnya intensitas komunikasi, kesediaan pendampingan dan untuk tetap mengikuti kegiatan selama Musrenbangprov. Komunikasi yang semakin baik akan berkontribusi pada penguatan kapasitas perencanaan daerah dalam konteks Sistem perencanaan nasional. Disamping itu upaya-upaya komunikasi semakin intensif diharapkan dapat memfasilitasi usulan-usulan daerah yang semakin logis, tajam, dan memiliki relevansi yang kuat dengan prioritas nasional. LO juga memberikan ruang bagi terbukanya koridor penyampaian usulan kegiatan oleh daerah kepada pusat.

Berdasarkan penilaian responden tahun 2013, terdapat peningkatan mutu pelaksanaan pada tahapan kegiatan Rakorbangpus, Musrenbangnas, Pasca Musrenbangnas, dan Musrenbangprov. Pada tahapan Pra Rakorbangpus dan Pra Musrenbangnas dinilai sedikit mengalami penurunan. Secara detail dapat ditunjukkan pada Tabel 15. berikut.

TABEL 15.
PENILAIAN TINGKAT IMPLEMENTASI TAHAPAN
PENYUSUNAN RKP 2013 DAN 2014.

TAHAPAN KEGIATAN	TINGKAT IMPLEMENTASI KEGIATAN (%)	
	2013	2014
Pra Rakorbangpus	95,96	85,14
Rakorbangpus	54,17	85,71
Musrenbangprov	86,72	87,66
Pra Musrenbangnas	93,80	82,14
Musrenbangnas	77,55	87,46
Pasca Musrenbangnas	83,33	85,71

Terdapat kondisi yang dianggap berkontribusi terhadap penurunan tingkat optimalitas tahapan pelaksanaan Pra Rakorbangpus. Berdasarkan penilaian responden bahwa pertemuan triwulanan sudah dapat digunakan sebagai media khususnya untuk masukan isu strategis dari daerah, namun masih perlu upaya peningkatan. Kondisi tersebut secara factual terkait dengan bahwa daerah memiliki kakarakteristik dan berpotensi berbeda. Dampaknya tentu jumlah isu atau permasalahan daerah dapat berbeda-beda pula dan memerlukan pembahasan dalam pertemuan triwulanan.

Selain Pra Rakorbangpus penurunan tingkat optimalitas pelaksanaan kegiatan juga terdapat pada tahapan pelaksanaan Pra Musrenbangnas. Berdasarkan penilaian responden kontributor dari kondisi tersebut terkait dengan adanya keraguan dari responden bahwa hasil pleno dapat secara optimal ditindaklanjuti dalam bentuk rekapitulasi berita acara kesepakatan yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden dalam Musrenbangnas. Diharapkan bahwa rekapitulasi berita acara kesepakatan perlu juga diserahkan ke Bappeda provinsi. Secara umum diseminasi informasi yang kurang berjalan optimal berjalan, kurang menguntungkan bagi Pemerintah Daerah. Selain itu sebagai media atau wahana tahapan perencanaan maka Pra Musrenbangnas perlu penyempurnaan pada pengendalian dan pengawalan Bappenas terhadap usulan yang telah disepakati dengan K/L terutama usulan-usulan baru dari daerah.

Selain kedua tahapan kegiatan tersebut, maka tahapan kegiatan lainnya mengalami peningkatan mutu pelaksanaan. Kondisi tersebut memberikan makna positif pada fasilitasi pelaksanaan penyusunan RKP khususnya tahun 2014. Beberapa usulan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat dipertimbangkan untuk perbaikan pelaksanaan penyusunan RKP 2015.

TUJUAN

2

Meningkatnya Peran Kementerian PPN/ Bappenas Terkait Koordinasi Kebijakan Pembangunan Nasional Lainnya

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya peran Kementerian PPN/ Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya

Indikator Kinerja

Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Nasional Lainnya Sesuai Peran Kementerian PPN/Bappenas

Tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan

37

Laporan
Akuntabilitas
Kinerja

Disamping pencapaian kinerja utama dalam menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya dalam rangka efektivitas kerjasama pembangunan nasional maupun internasional. Untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan sasaran strategis dari tujuan kedua, diukur melalui seberapa banyak tugas-tugas lain sebagai penugasan pemerintah/Presiden yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dibandingkan dengan total tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Pemerintah/Presiden. Dari target yang telah ditetapkan telah tercapai pelaksanaan seluruh penugasan yang diberikan oleh Pemerintah/ Presiden sebesar 100%.

Adapun sejumlah penugasan lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/ Bappenas, antara lain: (1) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Perpres No. 61 Tahun 2011) (2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (Inpres No. 3 Tahun 2010); (3) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Perpres No. 55 Tahun 2012); (4) Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035.

a. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GK)

Sebagai wujud komitmen penurunan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020 dari tingkat Business as Usual (BAU) dengan usaha sendiri, dan mencapai 41% apabila mendapat dukungan internasional (pidato Presiden RI dalam pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, 25 September 2009) telah disusun Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang dituangkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011. RAN-GRK tersebut bertujuan untuk memberikan kerangka kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menjadi acuan bagi pelaku usaha (swasta), masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan penurunan emisi GRK dalam jangka waktu 2010-2020. Upaya penurunan emisi GRK, selain pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, juga dilakukan pula di tingkat daerah agar daerah berkontribusi pula dalam pencapaian target nasional. Sampai dengan Oktober 2013, sebanyak 32 (tiga puluh dua) provinsi telah menyelesaikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan menerbitkannya dalam bentuk Peraturan Gubernur. Sementara, Papua Barat telah menyelesaikan RAD-GRK namun sedang dalam proses penerbitan Peraturan Gubernurnya.

Selanjutnya, untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAN-GRK dan RAD-GRK, Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2013 telah menyusun draft “Pedoman Umum Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK”; dan “Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD-GRK”, yang pada intinya menjelaskan secara ringkas tentang substansi, pengorganisasian dan mekanisme PEP di tingkat nasional dan tingkat daerah. Adapun Petunjuk Teknis memuat Lembar/Formulir Isian PEP beserta petunjuk pengisian untuk masing-masing bidang yang tercakup dalam RAN-GRK dan RAD-GRK yang disajikan secara rinci dengan penjelasannya agar mudah dipahami dan dilaksanakan. Selain itu Lembar/Formulir isian PEP ini digunakan juga untuk kebutuhan pelaporan inventarisasi GRK; penyelenggaraan inventarisasi GRK diatur dalam Peraturan Presiden No. 71/2011.

Proses selanjutnya setelah penyusunan pedoman tersebut di atas, adalah dilaksanakannya sosialisasi kepada daerah, pendampingan dan asistensi PEP RAD-GRK ke daerah, dan workshop/pelatihan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD-GRK bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga.

Sampai dengan November 2013, sebanyak 10 (sepuluh) provinsi telah mengirimkan hasil PEP RAD-GRK, yaitu: DI Yogyakarta, Bengkulu, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Lampung. Sementara sebanyak 2 (dua) Kementerian telah mengirimkan hasil PEP RAN-GRK, yaitu: Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Adapun K/L dan provinsi lainnya terus diupayakan untuk dapat mengirimkan hasil PEPnya, untuk menjadi acuan penurunan emisi gas rumah kaca mendatang.

b. Rencana Aksi Pangan dan Gizi Tingkat Pusat dan Daerah Tahun 2013

Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, di samping itu diinstruksikan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Kedua dokumen rencana aksi ini

disusun secara terpadu, terkoordinasi, sinergis, dan komprehensif karena bersifat lintas sektor dan lintas program, sehingga dalam penyusunannya melibatkan berbagai pihak terkait baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dasar pelaksanaan penyusunan rencana aksi, adalah dengan diterbitkan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 0154/M.PPN/05/2011 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Sepanjang tahun 2011 telah dilakukan pelaksanaan sosialisasi pedoman dan fasilitasi Penyusunan RAD-PG, baik melakukan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Bappenas maupun atas inisiatif pemerintah daerah. Rangkaian kegiatan pada tahun 2012 meliputi peluncuran RAD-PG pada bulan Mei 2012 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, penyusunan panduan monitoring dan evaluasi, sosialisasi mekanisme monitoring dan evaluasi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAN-PG dan RAD-PG tahun 2012.

Saat ini 33 provinsi telah memiliki peraturan gubernur tentang RAD-PG, Provinsi Papua Barat merupakan provinsi terakhir yang bergabung melalui Peraturan Gubernur Papua Barat No. Pergub Nomor 14 tahun 2012. Untuk memantau pelaksanaan rencana aksi tersebut telah diterbitkan Surat Edaran Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang SDM dan Kebudayaan No. 5147/D.I/09/2013 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG di daerah. Belum seluruh provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara teratur, kecuali 4 Provinsi yaitu Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten dan DI Yogyakarta. Untuk monitoring di tingkat pusat, telah tersusun hasil monitoring RAN-PG tahun 2013 yang tercakup dalam Laporan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi tingkat pusat dan daerah tahun 2013. Tantangan yang dihadapi sinergitas perencanaan pusat dan daerah yang masih lemah, komitmen dari beberapa pimpinan institusi dalam pengalokasian anggaran yang belum optimal dan pelaporan capaian rencana aksi yang tidak tepat waktu. Sedangkan dampak positif dari rencana aksi adalah pemahaman tentang masalah gizi makin luas dikalangan non-kesehatan, adanya inisiatif dari beberapa kabupaten dan kota untuk menyusun rencana aksi dan meningkatnya kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha.

c. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Perpres No. 55 Tahun 2012)

Sebagai konsekuensi diratifikasinya *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2006 telah mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011-2025 yang lebih komprehensif, yang dijadikan sebagai acuan bagi seluruh

stakeholders. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011-2025 tersebut ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasikan dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang konkrit bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dan konsolidasi demokrasi.

Ditetapkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014, dan Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1/2013 tentang Kormonev Stranas PPK, serta Inpres 1/2013 tentang Aksi PPK 2013 Bappenas selaku koordinator Implementasi Stranas PPK di tingkat Nasional, dan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri mendorong implementasi Aksi PPK di Pemerintah Daerah. Sebagai penjabaran rencana aksi jangka panjang 2011-2025, dibuat rencana aksi jangka menengah 2011-2014. Selain itu dibentuk juga rencana aksi yang lebih tajam dan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh Kementerian/Lembaga secara tahunan (dalam Inpres No. 1 Tahun 2013). Penyusunan Rencana Aksi Nasional Tahunan ini dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Beberapa capaian dalam rangka implementasi Stranas PPK pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Pemanfaatan teknologi informasi pada sektor perijinan yang meliputi pelayanan investasi migas online, *etracking* mineral dan batubara, kehutanan, ekspor-impor pangan, badan usaha jasa pengamanan, imigrasi – passpor, Investasi, peneliti asing, registrasi kendaraan bermotor, SIM-BPKB-STNK-TNKB, pertanahan, PTSP
- Perbaikan di sektor pajak dan bea cukai, antara lain tindak lanjut rekomendasi hasil survei, *joint audit*, kajian potensi penerimaan pajak, sistem informasi PNBPN online, tindak lanjut pengaduan masyarakat, *whistleblowing system*
- Transparansi pengadaan barang/jasa yang meliputi *whistleblowing system* khusus pengadaan barang/jasa, pelatihan SPSE, pedoman standarisasi LPSE, penyusunan RUP secara elektronik bagi Pemda
- Proses penegakan hukum, yang meliputi optimalisasi penanganan kasus korupsi, publikasi penerapan sanksi bagi pejabat dan aparat, tindak lanjut LHA PPATK oleh Kejaksaan dan POLRI, publikasi hasil pengaduan, pertukaran informasi antar aparat penegak hukum, pelatihan bersama dalam rangka penyelamatan aset, penguatan otoritas pusat, SOP ekstradisi, optimalisasi penanganan perkara, pembentukan unit penyelamatan aset, kajian terkait ekstradisi
- Penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan rekomendasi UNCAC yang meliputi pembahasan dan percepatan pengesahan RUU ekstradisi, MLA dan LPSK yang sesuai dengan rekomendasi UNCAC, kajian terkait kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat korupsi.
- Pendidikan dan budaya anti korupsi.

c. Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional, yang mencakup kurun waktu 20 tahun. Dokumen RPJPN harus dilengkapi dengan informasi tentang jumlah penduduk saat ini dan yang akan datang yang sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dalam memenuhi tujuan tersebut diperlukan informasi kependudukan yang dapat menunjang perencanaan pembangunan di masa yang akan datang, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Di samping jumlah penduduk, juga perlu diketahui proyeksi parameter kependudukan, seperti struktur umur penduduk, angka kelahiran total, serta angka harapan hidup penduduk. Oleh karena itu, sebagai bahan perencanaan pembangunan tersebut perlu dilakukan penyusunan buku proyeksi penduduk. Penyusunan ini dikoordinasikan oleh Kemneterian PPN/Bappenas yang bekerja sama dengan BPS, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, BKKBN, serta pakar demografi dan didukung oleh UNFPA. Dalam pelaksanaannya, penghitungan secara teknis menjadi tanggung jawab BPS.

Penugasan tahun 2013 tersebut di atas ada yang merupakan penugasan kelanjutan dari tahun 2012. Tujuan penugasan tersebut adalah untuk mendukung koordinasi dan kerjasama pembangunan baik secara nasional maupun internasional melalui suatu rencana aksi nasional maupun kerjasama pembangunan internasional. Diharapkan penugasan lainnya oleh Pemerintah/Presiden di tahun mendatang akan tetap diselesaikan dengan baik oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN

3

Tercapainya Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Kementerian PPN/ Bappenas

SASARAN
STRATEGIS

Tercapainya Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Kementerian PPN/ Bappenas

Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas merupakan tujuan tambahan untuk dapat memberikan gambaran keberhasilan atas pelaksanaan tugas-tugas pendukung Kementerian PPN/Bappenas tahun 2013 dengan sasaran strategis adalah terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mengukur keberhasilan peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 5 (lima) ukuran indikator kinerja yang akan menunjukkan keberhasilan pendukung kinerja Kementerian PPN/Bappenas, meliputi: 1) % Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM; 2) % Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas; 3) Fasilitasi dan Pembinaan SDM Aparatur Perencana Pusat dan Daerah; 4) Opini Dari BPK atas Laporan Keuangan; dan 5) Standar Penilaian *Good Governance*.

Sebagaimana Tabel 7 hasil pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan ketiga Kementerian PPN/Bappenas telah merealisasikan hasil capaian berdasarkan target rencana dalam penetapan kinerja tahun 2013.

Adapun penjelasan hasil capaian pengukuran kinerja dari sasaran dan tujuan kedua untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Indikator
Kinerja

1

Persentase Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

Tercapai 87,11% dari target 100%



Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan program Reformasi Birokrasi (RB) sejak tahun 2008 yang dituangkan dalam dokumen “Roadmap Reformasi Birokrasi” sesuai dengan kebijakan RB yang telah digariskan dalam PerMen PAN No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia dan ketatalaksanaan termasuk penataan program, kegiatan dan anggaran, sejalan dengan kebijakan anggaran berbasis kinerja. Dengan semangat *better performance*, seluruh pimpinan, staf, dan unit kerja melaksanakan program RB dalam rangka memberikan kontribusi secara signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan RB Nasional diarahkan untuk mengedepankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan *good governance* dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien sesuai PerMen PAN RB 20 tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Pelaksanaan Program RB Kementerian PPN/Bappenas tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahun keempat. Dalam pelaksanaan RB tahun 2013, terjadi perubahan metode penilaian reformasi birokrasi. Tahun 2013 diubah dengan menggunakan pendekatan penilaian mandiri (*self assessment*) sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Secara *Online*.

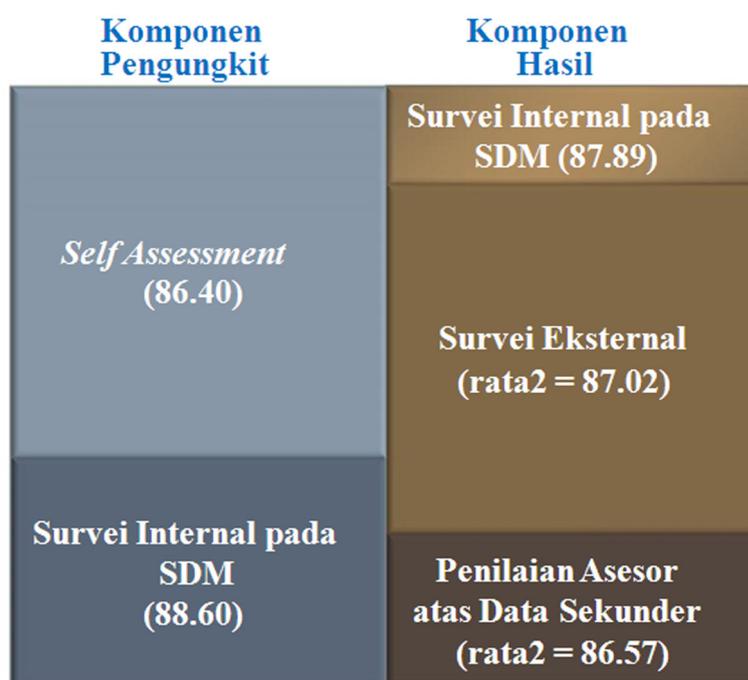
Berdasarkan pelaksanaan survei internal dan eksternal menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari pelaksanaan survei internal *online* yang dilaksanakan tanggal 13-17 Maret 2013 dengan partisipasi 100%. Hasil ini menunjukkan dampak positif yaitu adanya kepercayaan (*trust*) pegawai di Kementerian PPN/Bappenas terhadap instansinya yang memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan dalam upaya mencapai Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas.

Hasil survei eksternal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas pun menunjukkan hasil yang baik, dimana hasil tersebut mencerminkan adanya keberpihakan pada nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam

memberikan layanan, peduli pada isu-isu sosial, lingkungan maupun membina hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik (public trust) kepada Kementerian PPN/Bappenas.

Secara keseluruhan, penilaian Reformasi Birokrasi diperoleh hasil rata-rata 87,11% dengan hasil penilaian tiap komponen dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.

GAMBAR 5
HASIL PENILAIAN PMPRB



Realisasi pencapaian pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas tersebut lebih rendah dari pada target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan adanya perubahan metode penilaian yang semula dilaksanakan melalui *Quality Assurance* menjadi Penilaian Mandiri yang berpengaruh pada kriteria penilaian. Karena perkembangan inilah seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas perlu melakukan kalibrasi ulang fokus pelaksanaan dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang terdapat dalam PMPRB.

Meskipun tidak mudah melakukan perbandingan kuantitatif dengan tahun-tahun sebelumnya, secara kualitatif pelaksanaan RB di tahun 2013 banyak mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012. Pelaksanaan RB dengan menggunakan PMPRB berdampak pada perbaikan yang mengutamakan perbaikan proses disamping perbaikan hasil.

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas**Tercapai 97% dari target 100%**

Untuk mendukung tugas-tugas utama sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas perlu menyediakan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan standar pelayanan yang akan dilaksanakan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas merupakan salah satu tujuan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan khususnya dalam pemberian pelayanan yang lebih baik sesuai dengan moto Kementerian PPN/Bappenas adalah “*better performance*” Saat ini dengan semakin bertambahnya volume pekerjaan maupun penambahan pegawai baru sesuai dengan kebutuhan organisasi maka dirasakan kebutuhan akan sarana dan prasarana semakin dirasakan masih belum memadai. Untuk itu, kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang menjadi sangat prioritas dalam Renstra Periode 2010-2014. Salah satu yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana adalah penyediaan fasilitas kantor berupa gedung yang memadai termasuk penyediaan dan pemeliharaan sarana sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, serta sistem data/informasi dalam pengelolaan aset (Barang Milik Negara/BMN).

Pencapaian hasil pengukuran atas indikator kinerja ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas telah terealisasi pencapaian sebesar 97% dari yang ditargetkan, yang meningkat cukup pesat dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas dalam menyiapkan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dapat melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan baik internal maupun eksternal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan ukuran kinerja atas ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas adalah dengan membandingkan jumlah sarana dan prasarana yang dihasilkan sesuai standar dengan jumlah sarana dan prasarana yang direncanakan sesuai standar.

Pencapaian kinerja mengenai ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, yaitu:

- (a) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum dan operasional, mencakup antara lain: renovasi gedung dan ruang kerja, tersedianya buku-buku perpustakaan dan buku-buku yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas, buku-buku perpustakaan yang lebih terawat, tersedianya jaringan sistem informasi pengadaan perlengkapan sarana gedung, tersedianya meubelair, tersedianya alat pengolah data, pembangunan pagar kavling/asset

Kementerian PPN/Bappenas di Jatisari dan Jatisampurna, serta kegiatan audit struktur gedung Kementerian PPN/Bappenas.

- (b) Peningkatan kualitas pendukung pelayanan umum dan operasional, mencakup antara lain: tersusunnya rencana kerja/kegiatan, tersedianya dokumen pengadaan barang dan jasa, laporan reviu atas rencana dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terbitnya majalah Perencanaan Pembangunan, laporan hasil evaluasi penggunaan alat tulis kantor, laporan hasil evaluasi penggunaan ruang kantor dan area parkir, serta tersedianya alat tulis kantor.
- (c) Dalam upaya memfasilitasi Sistem Layanan Data dan Informasi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, pada tahun 2013 telah dilaksanakan: (1) penyempurnaan sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan, seperti pembuatan *Dashboard* Data dan Informasi; (2) pengembangan perpustakaan dan kearsipan antara lain: (i) penambahan koleksi bahan pustaka, (ii) pembuatan pedoman tata kelola kearsipan dan jadwal retensi arsip; (3) peningkatan prasarana teknologi informasi, seperti: (i) pembangunan *Disaster Recovery Center (DRC)* sebagai *backup* dan *recovery* data dan informasi yang berlokasi di Batam untuk menjaga keberlangsungan layanan teknologi informasi, (ii) peningkatan kapasitas koneksi internet dan intranet; (4) pengembangan sistem aplikasi, seperti: pembuatan platform jejaring kerja sebagai dasar pengembangan berkelanjutan untuk mewujudkan *virtual office*.

Sejak tahun 2006, Kementerian PPN/Bappenas sedang dan terus melakukan penataan manajemen Barang Milik Negara (BMN), pengorganisasian, penataan sistem dan prosedur, inventarisasi dan penerapan akuntansi BMN. Penghitungan awal akuntansi data seluruh aset BMN Kementerian PPN/Bappenas ke dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara berdasarkan saldo awal BMN pada tahun 2006 senilai Rp 109.099.192.458,00, dan sampai dengan 31 Desember 2013 nilai BMN Kementerian PPN/Bappenas di dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) meningkat menjadi Rp 470.200.642.987,00. Upaya untuk penataan manajemen BMN di Kementerian PPN/ Bappenas terus dilakukan sejak tahun 2006. Sebagai hasilnya, pada tahun 2012 Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Kementerian PPN/Bappenas berupa **“Peringkat Nomor Dua Terbaik Atas Pengelolaan BMN”**, dalam kelompok K/L yang mempunyai jumlah Satuan Kerja (Satker) antara 1 sampai 10 Satker.

Dengan capaian kineja tersedianya sarana dan prasarana aparatur di Kementerian PPN/Bappenas”, maka diharapkan: a) sarana dan prasarana yang tersedia dapat dimanfaatkan/ bermanfaat untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai dan lembaga; dan b) pengadaan dan pengelolaan BMN Bappenas dapat dilaksanakan lebih akuntabel.

Indikator Kinerja

3

% Fasilitasi dan Pembinaan SDM Aparatur Perencana Pusat dan Daerah

Tercapai 98,6% dari target 100%

Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, diperlukan pengembangan SDM aparatur perencana untuk mendukung tercapainya proses integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun di antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas mendorong peningkatan kapasitas aparatur perencana baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur perencana tersebut.

Pada dasarnya pelaksanaan pembinaan SDM Aparatur Perencana dilakukan melalui berbagai kegiatan yang intinya mendukung pencapaian kualitas pembinaan SDM Aparatur Perencana yaitu kegiatan mulai kegiatan seleksi peserta sampai dengan penempatan baik untuk program diklat gelar maupun non gelar, serta diklat penjenjangan perencana sesuai kompetensi untuk penjenjangan perencana.

Untuk mewujudkan kebijakan peningkatan kompetensi para aparatur perencana dan kapasitas institusi perencana di pusat dan di daerah secara lebih proporsional dan akuntabel, maka Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan program dukungan manajemen, yang didalamnya mencakup pengembangan sumber daya manusia aparatur perencana (*Capacity Building Program*) yang terdiri atas Program beasiswa SPIRIT (*Scholarship Program For Strengthening Reform Institutions*) periode 2010-2017 dan PHRDP III (*Human Resources Development Program*) periode 2006-2015. Sasaran program ini mencakup antara lain meningkatnya kualitas pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan penyelenggaraan Diklat Perencanaan.

Hasil pencapaian atas indikator kinerja "Fasilitasi dan Pembinaan SDM Aparatur Pusat dan Daerah Tahun 2013" adalah sebesar 98,60%, yang meningkat bila dibandingkan tahun 2012 sebesar 94,60% sebagaimana terdapat pada tabel 16. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas dapat meningkatkan kompetensi standar aparatur perencana melalui berbagai program pelatihan, baik jangka panjang maupun pendek untuk menghasilkan kualitas perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun penjelasan ukuran kinerja atas capaian kinerja fasilitasi dan pembinaan SDM Aparatur Perencana Pusat dan Daerah adalah berdasarkan perbandingan antara jumlah aparatur perencana yang ditingkatkan kompetensinya dengan jumlah aparatur perencana yang direncanakan pengembangan kompetensinya.

47

Laporan
Akuntabilitas
Kinerja

TABEL 16.
KINERJA PEMBINAAN SDM APARATUR PERENCANA
PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2012-2013

PROGRAM	2012			2013		
	RENCANA (orang)	REALISASI (orang)	%	RENCANA (orang)	REALISASI (orang)	%
1. Penempatan Diklat Gelar	670	614	92,7	624	646	103,5
• Dalam Negeri	447	412	92,1	433	435	100,5
• Linkage	165	139	84,2	74	84	113,5
• Luar Negeri	58	63	108,6	117	127	108,5
2. Penempatan Diklat non Gelar	1.247	1.429	114,5	1.282	1.412	95,6
• Dalam Negeri						
• Linkage	1.039	1.196	115	977	924	94,5
• Luar Negeri	50	75	150	130	130	100
	158	158	100	305	297	97,3
3. Pelaksanaan Kelulusan Kompetensi Penjengangan Perencana	299	299	100	568	567	99,8
• JFP Pertama	179	179	100	341	340	99,7
• JFP Muda	60	60	100	145	145	100
• JFP Madya	55	55	100	78	78	100
• JFP Utama	5	5	100	4	4	100
4. Pelaksanaan Diklat Penjengangan Perencana	420	299	71,2	594	568	95,6
• JFP Pertama	250	179	71,6	360	341	94,7
• JFP Muda	100	60	60,0	145	145	96,6
• JFP Madya	60	55	91,2	78	78	97,5
• JFP Utama	10	5	50,0	4	4	100
JUMLAH			94,6			98,6

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa pada tahun 2013 berhasil menjangkau 646 orang calon peserta diklat gelar, dari target sebanyak 624 orang (lebih dari 100%). Sedangkan untuk diklat non gelar terdapat peserta sebanyak 1.412 orang. Selain diklat gelar dan non gelar, Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana Pusat dan Daerah melalui diklat Fungsional Perencana dengan melibatkan aparatur sebanyak 567 orang dari target sebanyak 568 orang. Untuk memperkuat kualitas Tim Penilai, telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas Tim Penilai dan Sekretariat Tim Ahli bagi Fungsional Perencana Nasional melalui pelatihan dan *workshop*.

Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan tahun 2010, 2011, dan 2012 terlihat bahwa tahun 2013 capaian kinerja fasilitasi dan pembinaan SDM Aparatur Perencana Pusat dan Daerah terus meningkat sebagaimana terdapat pada Tabel 17.

TABEL 17.
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
DIKLAT SDM APARATUR PERENCANA PUSAT DAN DAERAH

PROGRAM DIKLAT PERENCANA	CAPAIAN KINERJA (%)			
	2010	2011	2012	2013
Penempatan Diklat Gelar	83,0	90,0	92,7	103,5
Penempatan Diklat non Gelar	100	100	114,5	95,6
Pelaksanaan Kelulusan Kompetensi	100	100	100,0	100
Penjenjangan Perencana				
Pelaksanaan Diklat Penjenjangan Perencana	87,0	88,0	71,2	99,7
TOTAL KEBERHASILAN	92,5	94,5	94,6	98,6

Sehubungan dengan peningkatan kapasitas tersebut, Kementerian PPN/ Bappenas sebagai penyedia dan pengelola beasiswa diklat perencanaan, telah bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri ternama baik di dalam negeri dan luar negeri. Pada tahun 2013, program diklat melibatkan 11 perguruan tinggi pada 18 program studi pelaksana gelar dan diklat non-gelar yang menjadi sasaran kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta tujuh program studi *linkage* Jepang dan enam program studi *linkage* Belanda. Adapun Program Studi penyelenggara diklat gelar yang ada di 11 perguruan tinggi di dalam negeri, yaitu Universitas Syiah Kuala, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Hasanudin.

Untuk program *S2 linkage* Jepang, terdapat enam program studi yang berada di 5 perguruan tinggi di Indonesia (ITB, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Pajajaran, dan Universitas Brawijaya bekerjasama dengan 10 perguruan tinggi di Jepang (Ritsumeikan University, Kobe University, Keio University, Miyazaki University, Yamaguchi University, Hiroshima University, GRIPS, Takushoku University, IUJ, Tohoku University). Sedangkan untuk program *S2 Linkage* Belanda, 6 universitas di Indonesia (ITB, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Sriwijaya, Universitas Pajajaran, bekerjasama dengan 6 universitas di Belanda (Rijksuniversiteit Groningen, Vrije University, Tillburg University, IHS Belanda, ITC Enschede, IHE, Twente University).

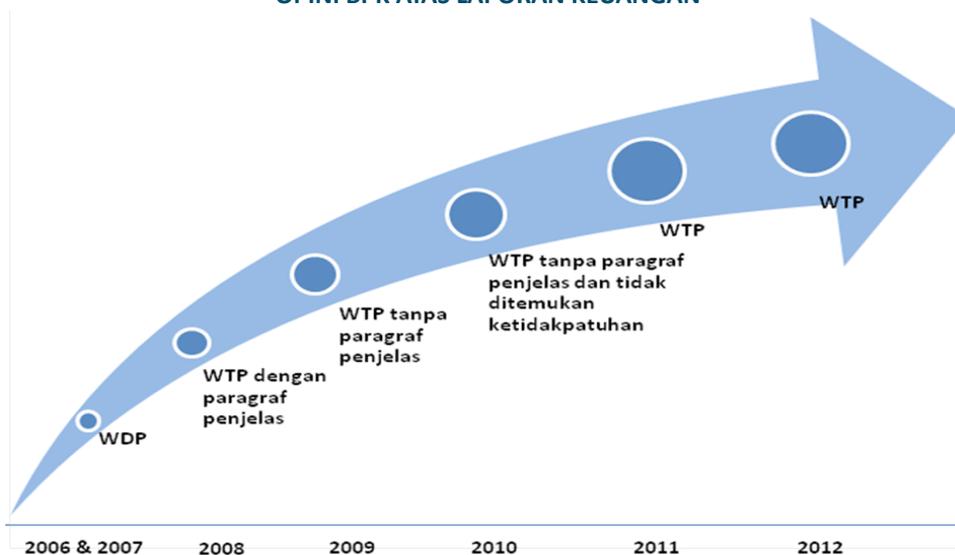
Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L

Dengan hasil penilaian laporan WTP realisasi tercapai 100% dari target WTP.

Salah satu ukuran keberhasilan indikator lainnya dalam pencapaian peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas adalah adanya opini dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas. Untuk mengukur pencapaian opini BPK atas Laporan Keuangan adalah melalui pemeriksaan oleh Auditor eksternal, yaitu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) secara rutin setiap tahun dengan menggunakan Metode Penilaian yang ditetapkan BPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran dalam Metode BPK tersebut menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan audit keuangan dan audit kinerja.

Pada tahun 2012 Kementerian PPN/Bappenas mengelola dana dekonsentrasi pada 33 provinsi di seluruh Indonesia. Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012 yang mencakup pertanggungjawaban keuangan pada 35 satuan kerja (2 satker pusat dan 33 satker dana dekonsentrasi) di Kementerian PPN/Bappenas. *Dari hasil penilaian BPK tersebut telah dihasilkan penilaian WTP (wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2013 untuk tahun periksa tahun 2012.* Prestasi ini menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Kementerian/Lembaga yang meraih opini WTP selama 5 (lima) tahun berturut-turut (Laporan Keuangan tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012), sebagaimana terlihat pada Gambar 6 berikut.

GAMBAR 6.
OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN

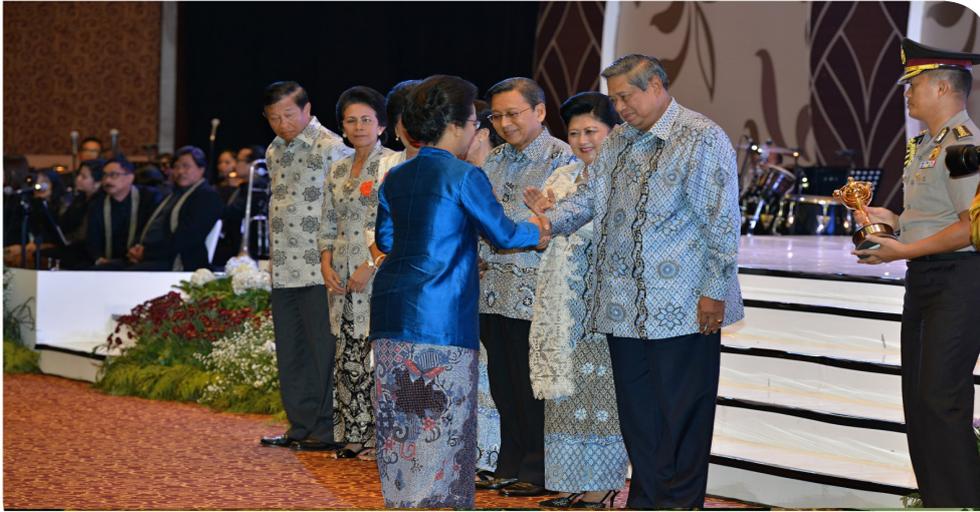


Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dua hal penting atas dampak hasil opini tersebut, yaitu: pertama, opini WTP dapat menggambarkan akuntabilitas institusi baik dalam pengelolaan keuangan maupun kinerja sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Kementerian PPN/Bappenas dapat terjaga. Kedua, opini WTP merupakan wujud tercapainya salah satu kontrak kinerja yang sudah ditandatangani Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden. Prestasi opini tertinggi ini dicapai melalui kerja keras dan upaya perbaikan serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, khususnya unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas sebagai Koordinator penyusunan laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas.

Disamping itu, untuk menjaga kualitas (*quality assurance*) penyusunan laporan keuangan juga dilakukan reviu secara berkala (Semester dan Tahunan) oleh Inspektorat atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas serta pendampingan selama proses audit dalam mendorong rencana aksi penyelesaian rekomendasi pemeriksaan (salah satunya penyelesaian temuan terkait pencatatan aset) sebagai pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan keuangan.

Opini WTP atas laporan keuangan merupakan salah satu kontrak kinerja yang sudah ditandatangani Ibu Menteri dengan Bapak Presiden pada awal tugas sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pencapaian opini WTP juga merupakan isu yang sangat penting karena memberikan gambaran tingkat kewajaran dari akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud pada suatu laporan keuangan. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa opini WTP dari BPK dapat terus dicapai dan dipertahankan, tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh dan nyata untuk terus melakukan perbaikan proses manajemen dan peningkatan mutu laporan keuangan serta menindaklanjuti temuan BPK atas kelemahan-kelemahan yang ada. Pada tahun-tahun tercapainya opini WTP atas laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas, telah dilaksanakan berbagai aktivitas untuk mendukung upaya mempertahankan opini WTP yang secara terus menerus dan berlanjut. Tahap-tahap aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Identifikasi titik kritis/permasalahan yang akan menghambat pencapaian opini laporan keuangan “WTP”.
- (b) Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- (c) Monitoring dan evaluasi atas perbaikan.
- (d) Pelaksanaan *Quality Assurance*.
- (e) Pendampingan atas pemeriksaan BPK.

Indikator
Kinerja

5

Standar Penilaian *Good Governance***Kinerja tercapai 100% dari target yang ditetapkan "baik".**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance* yang lebih berkualitas, Kementerian PPN/Bappenas melakukan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur yang berorientasi pada nilai tambah. Program ini dilaksanakan oleh Unit Eselon 1 Inspektorat Utama yang terdiri dari 2 (dua) besaran kegiatan yaitu kegiatan *assurance* dan kegiatan konsultasi.

Kegiatan *assurance* difokuskan pada signifikansi dampak produk atau pelaksanaan tugas dan fungsi bagi institusi. Disamping itu, dilakukan proses reuiu atas laporan keuangan, dan reuiu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menjadi kewajiban instansi dalam menjaga akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan.

Ruang lingkup kegiatan konsultasi meliputi edukasi, fasilitasi dan pemberian nasehat (*advisory*). Dalam kerangka ini, telah dilakukan beberapa kegiatan, yaitu: (1) penugasan *liaison officer* (LO) untuk mengawal PPK dan unit kerja dalam mengelola anggaran, dan LO melakukan pendampingan dan pemantauan penyerapan anggaran dan pendampingan dalam pelaksanaan audit oleh pihak eksternal (BPK/BPKP); (2) diagnosis *assessment* terhadap manajemen dalam rangka mengidentifikasi risiko di level strategis, dan menyusun rencana aksi untuk memitigasi risiko sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diamanatkan dalam PP No. 60/2008; (3) pemetaan tata laksana penyusunan RKP 2014 untuk menemukenali pemangku kepentingan dan mengoptimalkan peran masing-masing pihak dalam penyusunan RKP tersebut; dan (5) telah dicanangkannya Zona Integritas sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam upaya mencegah praktek korupsi.



Penyerahan
Penghargaan
Keterbukaan Informasi
Publik 2013 (PPID) oleh
Wakil Presiden RI

Terkait dengan pelaksanaan RB, sesuai Permen PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Inspektorat mempunyai peran sebagai Koordinator Penilaian Reformasi Birokrasi (Koordinator Asesor). Selama tahun 2013, Inspektorat telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mendorong manajemen untuk lebih mempercepat pelaksanaan RB melalui diskusi, sosialisasi dan internalisasi baik di lingkup Inspektorat Utama sendiri, unit kerja, maupun dengan instansi yang terkait dengan RB. Pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam kegiatan RB terkait dengan pendampingan dalam tata cara pengisian aplikasi RB yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB. Selain itu juga dilakukan penilaian terhadap dokumen hasil kegiatan RB di masing-masing ke deputian, selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap langkah tindak yang disusun oleh masing-masing ke deputian yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan RB tahun selanjutnya.

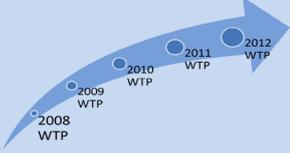
Selain itu juga, Inspektorat juga melakukan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IACM) dalam rangka melaksanakan pengawasan, dan telah diterbitkannya Permen PPN/Kepala Bappenas No.5 Tahun 2013 tentang *Whistle Blowing System*.

Semakin membaiknya standar penilaian tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) merupakan salah satu indikator keberhasilan dari Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Beberapa penghargaan yang diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas selama tahun 2013 yang dapat mendorong peningkatan kinerja dan terciptanya lingkungan kerja yang baik, seperti yang terdapat pada Tabel 18 berikut.

TABEL 18.

DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2013

NO.	NAMA PENGHARGAAN	PERINGKAT	KETERANGAN	
1.	Penghargaan Hasil Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2012	WTP	Hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2012 – dari BPK RI	
2.	Penghargaan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara 2012	Juara Kedua	Penghargaan atas Kualitas Kinerja Pengelolaan BMN 2012 – dari Kementerian Keuangan	
3.	Penghargaan JICA President Award		Penghargaan JICA atas Peran dan Kontribusi Bappenas dalam Kerjasama Perubahan Iklim – dari President JICA	
4.	Penghargaan Akuntabilitas Kinerja 2012	B+	Penghargaan atas Prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 – dari Kem. PAN & RB	
5.	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2013 (PPID)	10 Besar (Peringkat 10)	Penghargaan atas Prestasi Keterbukaan Informasi Publik – dari Komisi Informasi Pusat	
6.	Penghargaan e-Transparency Award 2013	10 Besar (Peringkat 8)	Penghargaan atas Prestasi Transparansi Informasi di Website – dari Open Government Indonesia	
7.	Anugerah Parahita Ekapraya 2013	Juara I Kategori Utama	Penghargaan atas Prestasi Bappenas dalam Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) – dari Presiden RI	

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

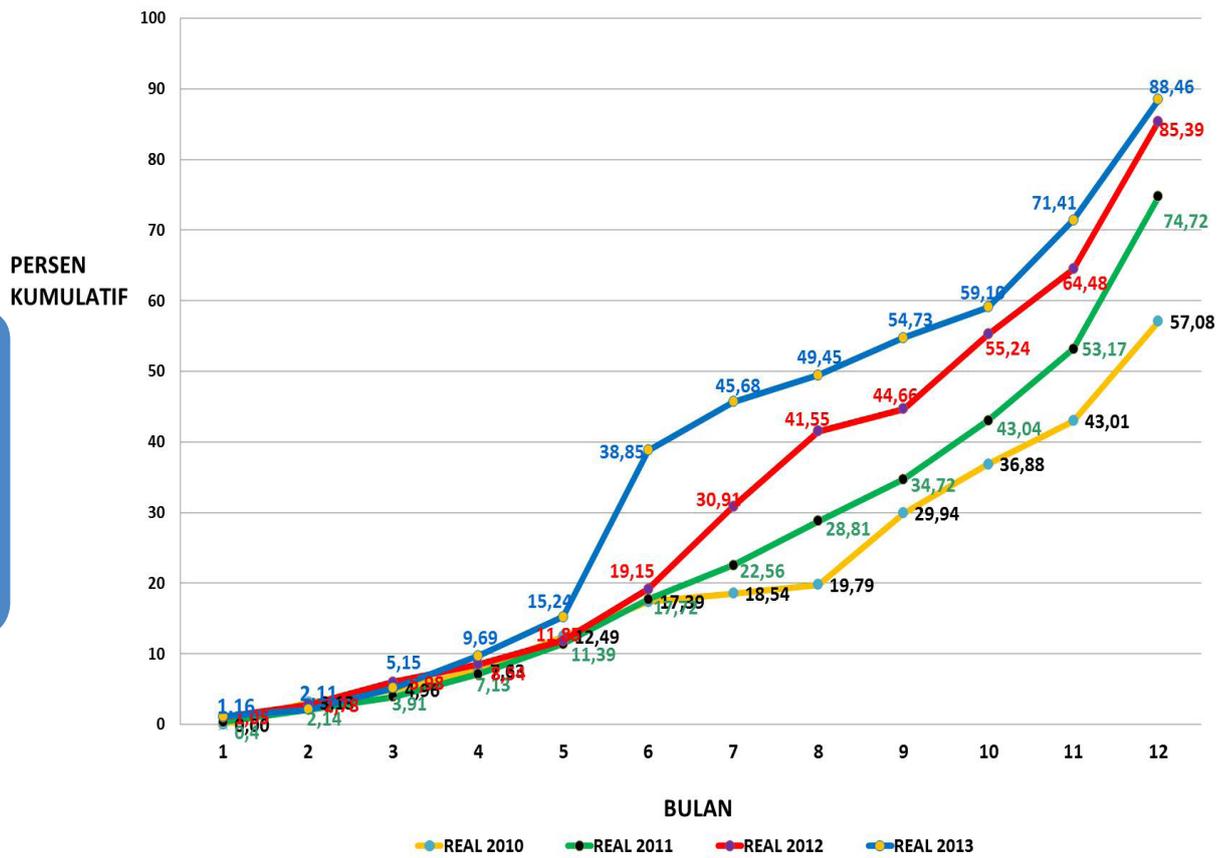
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, pada tahun 2013 Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.100,720 miliar yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 534,502 miliar (48,56%) dan untuk PHLN sebesar Rp. 566,217 (51,44%). Realisasi penyerapan anggaran tahun 2013 mencapai sebesar Rp. 633,331 miliar (85,39%) yang terdiri dari dana rupiah murni sebesar Rp. 380,873 miliar (85,35%), dan dana PHLN sebesar Rp. 252,457 miliar (85,46%), seperti yang terlihat pada Tabel 19 dan Tabel 20. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2013 sebesar 88,46% lebih tinggi bila dibandingkan persentase realisasi anggaran pada tahun 2012 sebagaimana terdapat pada Gambar 7.

TABEL 19.
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2013

(dalam ribu)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
I	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas	311.005.187	213.015.379	524.020.566	244.352.666	78,57	186.807.826	87,70	431.160.492	82,28
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	53.050.000	-	53.050.000	50.559.539	95,31	-	-	50.559.539	95,31
III	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	4.800.000	-	4.800.000	4.638.757	96,64	-	-	4.638.757	96,64
IV	Perencanaan Pembangunan Nasional	165.647.497	353.202.356	518.849.853	150.624.914	90,93	336.720.802	95,33	487.345.717	93,93

GAMBAR 7.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2010, 2011, 2012, DAN 2013



TABEL 20.
KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2013

PROGRAM	ANGGARAN		OUTPUT KEGIATAN
	ALOKASI	REALISASI	
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	518.849.853.000	487.345.717.687	Rencana prioritas pembangunan nasional di berbagai bidang dengan melakukan: (1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggaran, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan (2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional (3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan (4) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional (5) Kajian kebijakan di berbagai bidang perencanaan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/ Bappenas	524.020.566.000	431.160.492.856	(1) Dukungan rangkaian kegiatan penyusunan RKP dan Musrenbangnas (2) Hasil pelaksanaan Koordinasi strategis Konektivitas Nasional, MP3EI, Kesejahteraan sosial, Perubahan iklim dan lingkungan hidup, Pengembangan Kerjasama Pembangunan G-20 dan Selatan-Selatan, serta Tata kelola pemerintahan yang baik. (3) Penguatan fungsi perencanaan pusat dan daerah melalui peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah. (4) Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga, peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan, serta penyempurnaan ketatalaksanaan. (5) Pelaksanaan kegiatan pendukung dan teknis lainnya.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/ Bappenas	53.050.000.000	50.559.539.682	(1) Pengadaan sarana dan prasarana gedung (2) Pengadaan alat pengolah data dan sistem informasi (3) Pengadaan/penggantian kendaraan dinas (4) Renovasi ruang kerja dan rapat
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PPN/ Bappenas	4.800.000.000	4.638.757.563	(1) Hasil pengawasan dan pembinaan terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui Pemeriksaan, <i>Review</i> , Evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi umum, keuangan, dan kinerja serta melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dari pemeriksa eksternal dan internal. (2) Peningkatan peran konsultasi dengan melibatkan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Liason Officer</i> kepada unit kerja dalam rangka penerapan SPIP

Rincian realisasi penyerapan anggaran tahun 2013 yang dilaksanakan dari masing-masing program sebagaimana dijelaskan pada Tabel 20 adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan dalam rangka terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun anggaran 2013 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 518.849.853.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 165.647.497.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 353.202.356.000,-. Realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 487.345.717.687,- (93,93%) yang terdiri dari RM sebesar Rp. 150.624.914.929,- (90,93%), dan dana PHLN sebesar Rp. 336.720.802.758,- (95,33%).

Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional ini dikelola oleh 12 (dua belas) PPK yang berada di UKE I (Kedeputian) yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan Kedeputian antara lain:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/ penganggarnya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan.
- 2) Koordinasi perencanaan, antara lain: koordinasi pemantauan pelaksanaan RAD percepatan pencapaian MDG, pemantauan dan evaluasi pencapaian RAN/D Pangan dan Gizi 2011-2015, persiapan hibah *Millennium Challenge Corporation for Indonesia* (MCC for Indonesia-USA) serta penyusunan dan pelaksanaan MP3KI.
- 3) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, antara lain: evaluasi 3 (tiga) tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014, evaluasi akhir tahun RKP 2012, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PerPres 55/2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2010-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014.
- 4) Penyusunan Kajian Kebijakan di bidang Perencanaan (fungsi *Think-Tank*) antara lain: melakukan kajian untuk perumusan perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek dengan melibatkan *stakeholder* (dunia usaha, asosiasi profesi, asosiasi usaha, dan perguruan tinggi).

Dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam Program Perencanaan Pembangunan Nasional ini, pencapaian target indikator kinerja utama Kementerian PPN/Bappenas tahun 2013 telah sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah untuk meningkatkan efektifitas penyusunan RPJMN 2010-2014, dan RKP 2014, serta terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2013 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 524.020.566.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 311.005.187.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 213.015.379.000,-, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
- 2) Penyempurnaan tata kelola dan manajemen internal antara lain: pemantapan Reformasi Birokrasi, mempertahankan pencapaian opini laporan keuangan (WTP), serta penataan manajemen *asset* Kementerian PPN/Bappenas.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
- 4) Peningkatan kualitas kehumasan, serta sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 4 (empat) PPK di Sekretariat Kementerian PPN/Settama Bappenas dan mencapai realisasi sebesar Rp. 431.160.492.856,- (82,28%) yang terdiri dana RM sebesar Rp. 244.352.666.409,- (78,57%), dan dana PHLN sebesar Rp. 186.807.826.447,- (87,70%). Dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut, pencapaian target indikator kinerja utama pada tahun 2013 telah sesuai dengan sasaran strategis telah ditetapkan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur termasuk penyediaan sarana sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, dan sistem data/informasi dalam pengelolaan aset (Barang Milik Negara). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah:

- 1) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor.
- 2) Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional.
- 3) Peningkatan kualitas penudukung pelayanan umum dan operasional.

Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2013 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 53.050.000.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 50.559.539.682,- (95,31%). Dengan realisasi dan pelaksanaan kegiatan tersebut, pencapaian target indikator kinerja utama pada tahun 2013 telah sesuai dengan sasaran strategis telah ditetapkan.

4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Sasaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas adalah meningkatnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN). Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2012 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.800.000.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 4.638.757.563,- (96,64%). Pencapaian realisasi anggaran pada program ini tertinggi dibandingkan dengan program lainnya.

Anggaran program ini dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Utama, antara lain:

- 1) Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Bidang Administrasi Umum adalah: (a) Optimalisasi Peran Konsultasi Internal Auditor; (b) Peningkatan Kompetensi Profesi Auditor secara berkelanjutan; (c) Monitoring Pengawasan Anggaran; (d) Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan Keuangan; (e) Koordinasi Strategis Rencana Aksi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (f) Penyusunan Kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS).
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan adalah: (a) Optimalisasi Peran Koordinasi Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan; (b) Rencana Aksi Peningkatan Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (c) Koordinasi Strategis Implementasi Monitoring dan Evaluasi; (d) Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan; (e) Pemetaan Proses Bisnis Persiapan Penyusunan RPJMN 2014-2019; dan (f) Pengawasan Kinerja Program/Kegiatan.

Dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam program ini, pencapaian target indikator kinerja utama Kementerian PPN/Bappenas tahun 2013 telah sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2013 yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014, Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, telah menghasilkan Rancangan Dokumen RKP 2014 yang berkualitas, serta telah menyelesaikan berbagai penugasan lainnya dalam rangka koordinasi dan kerjasama pembangunan, baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan dalam kaitan peningkatan kapasitas kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai hasil yang memuaskan khususnya di bidang pengelolaan keuangan serta pengembangan kapasitas kelembagaan dari aspek organisasi, manajemen SDM dan tatalaksana, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan serta pelayanan, baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mendukung tujuan reformasi birokrasi nasional.

Atas tercapainya hasil kinerja tahun 2013, Kementerian PPN/Bappenas harus terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun akan datang. Hal-hal penting yang harus ditingkatkan dalam masa mendatang agar peningkatan kinerja Kementerian PPN/Bappenas benar menunjukkan sebuah lembaga yang sangat strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan terus peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional.
- 2) Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM Kementerian PPN/Bappenas agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) terhadap perubahan lingkungan strategis nasional maupun internasional sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan pembangunan nasional.
- 3) Kementerian PPN/Bappenas terus melanjutkan reformasi birokrasi dengan fokus dan konsisten pada pengembangan manajemen kinerja sesuai dengan *Roadmap* yang telah disusun.

